



SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR – FAKTOR TERJADINYA KEMISKINAN DI KECAMATAN KAMPAR



Oleh :

Randi Januarisman
143410672

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEMISKINAN DI KECAMATAN KAMPAR

Oleh:

RANDI JANUARISMAN
143410672

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa di tanggulangi dengan baik. Selain itu kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan, merupakan salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah pedesaan. Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Kampar sangat berakibat terhadap laju pertumbuhan ekonomi, hal ini juga berimbas terhadap pembangunan wilayah, dan belum terpirincinya karakteristik kemiskinan seperti apa yang terjadi di Kecamatan Kampar.

Metode Deskriptif Kuantitatif digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan serta strategi penanganan kemiskinan. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini di urutkan berdasarkan dengan tujuan dan sasaran penelitian, adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Hasil yang didapatkan dari strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Kampar antara lain dengan melakukan meningkatkan pelayanan dan produktivitas pertanian di Kecamatan Kampar, mengembangkan potensi masyarakat dalam hal membangun pondasi ekonomi kerakyatan, program peningkatan ekonomi di Kecamatan Kampar, meningkatkan keterampilan masyarakat di Kecamatan Kampar. Dengan kondisi tersebut dapat dilihat bagaimana karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ekonomi, Pembangunan dan Masyarakat



COMMUNITY PERCEPTION ON FACTORS OF POVERTY IN KAMPAR DISTRICT

By:

RANDI JANUARISMAN
143410672

Urban and Regional Planning Study Program
Faculty of Engineering, Islamic University of Riau

ABSTRACT

The problem of poverty which is quite complex requires the intervention of all parties jointly and coordinated. However, the handling so far tends to be partial and unsustainable. The rise of development activities and planning has not been fully capable of prospering the nation and state. Development in various sectors has also not been able to accommodate and meet the needs of the community. We can see that until now the problem of poverty has not been handled properly. In addition, the government's policy of allocating a larger development budget in urban areas than in rural areas is one of the factors causing rural areas to be left behind and structural poverty is increasing in rural areas. The high poverty rate in Kampar Sub-district greatly affects the rate of economic growth, this also has an impact on regional development, and the characteristics of poverty are not yet detailed as what happened in Kampar District.

Quantitative Descriptive Method is used in this study which aims to describe the characteristics of poverty, the causes of poverty and poverty management strategies. Quantitative method can be defined as a research method based on the philosophy of positivism, used to examine a particular population or sample. The method of analysis in this study is sorted according to the aims and objectives of the study, as for the analytical techniques used in the study.

The results obtained from the poverty alleviation strategy in Kampar District include improving services and agricultural productivity in Kampar District, developing community potential in terms of building a people's economic foundation, economic improvement programs in Kampar District, improving community skills in Kampar District. With these conditions, it can be seen how the characteristics of poverty in Kampar District are.

Keywords: Poverty, Economy, Development and Society



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kemiskinan di Kecamatan Kampar”* untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (satu) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau.

Melalui Pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota untuk menerapkan ilmu perencanaan yang telah diterima selama perkuliahan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang telah banyak member dukungan dan dorongan baik secara moril maupun materi.
2. Bapak Dr.Eng. Muslim, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.



3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dan pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Instansi - instansi terkait yang berada di Kecamatan Kampar yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Teman – teman Planologi C'14 yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, menjadi ukuran bagi kesempurnaan tugas akhir ini. Maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Demikian dengan selesainya tugas akhir ini, penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini berguna dan bermanfaat fi kemudian hari.

Pekanbaru, Desember 2021

Randi Januarisman



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup.....	7
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi	7
1.5.2 Ruang Lingkup Materi	8
1.6 Kerangka Berfikir	9
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Konsepsi Dasar Kemiskinan	14
2.1.1 Definisi Kemiskinan	14
2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan.....	16
2.2 Pandangan Tentang Kemiskinan.....	18
2.2.1 Pandangan Konservatif	18
2.2.2 Pandangan Liberal	19
2.2.3 Pandangan Transformatif.....	20



2.3 Indikator Kemiskinan.....	21
2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan	25
2.4.1 Faktor Sosial Ekonomi	25
2.5 Karakteristik Kemiskinan	30
2.6 Teori Strategi Dalam Mengatasi Kemiskinan.....	36
2.7 Perencanaan dan Program Pembangunan Belum Dapat Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia	38
2.8 Pembangunan dan Kemiskinan.....	40
2.9 Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.2.1 Lokasi.....	48
3.2.2 Waktu Penelitian.....	48
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	48
3.3.1 Jenis Data Penelitian.....	48
3.3.2 Sumber Data Penelitian	49
3.4 Tahap Penelitian.....	50
3.4.1 Tahap Persiapan.....	50
3.4.2 Tahap Pengumpulan Data.....	51
3.5 Populasi dan Teknik Sampel.....	52
3.5.1 Populasi.....	52
3.5.2 Teknik Sampel	53
3.6 Teknik Analisis	54
3.6.1 Karakteristik Kemiskinan	55



3.6.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan	57
3.7 Variabel Penelitian.....	58
3.8 Desain Penelitian	60
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	69
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kampar	69
4.1.1 Kondisi Geografis	69
4.1.2 Kondisi Alam	70
4.1.3 Kependudukan	71
4.1.4 Pendidikan	72
4.1.5 Kesehatan.....	74
4.1.6 Ekonomi.....	75
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	79
5.1 Karakteristik Kemiskinan di Kecamatan Kampar	79
5.1.1 Kesehatan.....	79
5.1.1.2 Jaminan Kesehatan di Kecamatan Kampar	80
5.1.2 Pendidikan	83
5.2 Faktor Terjadinya Kemiskinan	94
BAB VI PENUTUP	108
6.1 Kesimpulan	108
6.1 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Utama Kemiskinan.....	24
Tabel 2.2 Sintesis Faktor Pekerjaan.....	27
Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya.....	45
Tabel 3.1 Distribusi Sampel Per-Desa/Kelurahan	56
Tabel 3.2 Definisi Operasional	58
Tabel 3.3 Variabel Penelitian.....	62
Tabel 3.4 Desain Penelitian	64
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2020	67
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Kampar Tahun 2020.....	69
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kampar Tahun 2020.....	71
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kampar Tahun 2020	72
Tabel 4.5 Jumlah Usaha Perdagangan yang Terdaftar Menurut Desa di Kecamatan Kampar Tahun 2020.....	73
Tabel 5.1 Tabel Hasil Pengukuran Skor Variabel Pendidikan	85
Tabel 5. 2 Kondisi Jaringan Listrik di Kecamatan Kampar	91
Tabel 5.3 Hasil Pengukuran Skor Variabel Standar Kehidupan	92
Tabel 5.4 Hasil Pengukuran Skor Faktor Kemiskinan	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kampar	9
Gambar 1.2 Peta Lokasi Penelitian	10
Gambar 1.3 Peta Administrasi Kecamatan Kampar	11
Gambar 1.4 Kerangka Berfikir	14



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hall dan Midgley (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat secara ekonomi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Suparlan (2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak



pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003) bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, keterbelakangan, ketidak mampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan rendah, penyakit karena tidak mampu membiayai biaya kesehatan, status lemah dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Dari segi fisik kemiskinan identik dengan tempat tinggal di daerah pedesaan, pesisir pantai, bantaran sungai yang keruh, kotor dan rumah kumuh. Bahkan kemiskinan dapat menyebabkan seseorang gelap mata sehingga melakukan beragam hal negatif untuk mencukupi kebutuhan, misalnya pelacuran, pencurian, penipuan, bunuh



diri, dan banyak hal lain akibat dari kemiskinan yang membelenggu.

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu : pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, beban keluarga (Hudyana, 2009).

Adapun menurut Suryawati (2004) ada beberapa bentuk-bentuk kemiskinan yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan situsional atau kemiskinan natural, dan kemiskinan kultural. Menurut Baswir (2003) berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu ; kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktur.

Kemiskinan di negara sedang berkembang menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan meskipun kebanyakan negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi, namun pada



saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan relative semakin meningkat terutama di wilayah pedesaan.

Dewasa ini kemiskinan menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan karakteristik penyebab kemiskinan struktural yang dialami sangat banyak. Selain itu kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan, merupakan salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah pedesaan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan



belum bisa di tanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, dan merupakan salah satu Kabupaten tertua yang ada di Provinsi Riau, namun Kabupaten Kampar masih banyak mengalami permasalahan terutama masalah kemiskinan. Total penduduk Kabupaten Kampar sebanyak 812.702 jiwa dan masyarakat yang menerima bantuan kemiskinan menurut basis data terpadu sebanyak 257.179 jiwa (BPS, 2021). Adapun kemiskinan di Kecamatan Kampar masih cukup signifikan. Kecamatan Kampar adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampar merupakan salah satu



kecamatan yang mendapatkan dana bantuan miskin yang masih tinggi di Kabupaten Kampar dengan jumlah penerima bantuan miskin sebanyak 15.452 jiwa (BPS, 2021). Untuk keluar dari kemiskinan, tentu terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik kemiskinan yang ada di Kecamatan Kampar dan juga mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Kampar. Hal ini tentu mengacu kepada teori-teori yang sudah ada sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk itu penulis memberi penelitian ini dengan judul “*(Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kemiskinan di Kecamatan Kampar)*.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok di daerah studi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Kampar sangat berakibat terhadap laju pertumbuhan ekonomi, hal ini juga berimbas terhadap pendidikan masyarakat yang masih rendah.



- b. Melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemiskinan di Kecamatan Kampar terkait pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan, dan keterbatasan modal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
- c. Bagaimana peranan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kampar.

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian/*research question* yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar?
2. Apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat terhadap faktor terjadinya kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Kampar.

1.4 Sasaran Penelitian

- a. Mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.



- b. Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap factor-faktor terjadinya kemiskinan di Kecamatan Kampar.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:

- a. Pihak Pemerintah

Bahan masukan yang bermanfaat dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Kampar sehingga menjadi masukan untuk meningkatkan strategi guna mengurangi angka kemiskinan.

- b. Pihak Akademis

Bahan perbandingan (komparasi) terhadap hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, dalam konteks untuk meningkatkan dan pendalaman pengetahuan tentang strategi penanggulangan kemiskinan. diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat menjadi referensi yang dapat diajukan sebagai bahan percontohan bagi penelitian yang sama selanjutnya.



c. Peneliti

Agar apa yang telah dilakukan selama penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang strategi penanggulangan kemiskinan serta memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian serta menyusun hasil penelitian.

1.6 Ruang Lingkup

Dalam studi penelitian ini ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang lingkup wilayah studi dan ruang materi, ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Kecamatan Kampar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayah menurut pengukuran BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kampar adalah lebih kurang 136,28 km², mempunyai 18 desa/kelurahan dengan pusat pemerintah berada di

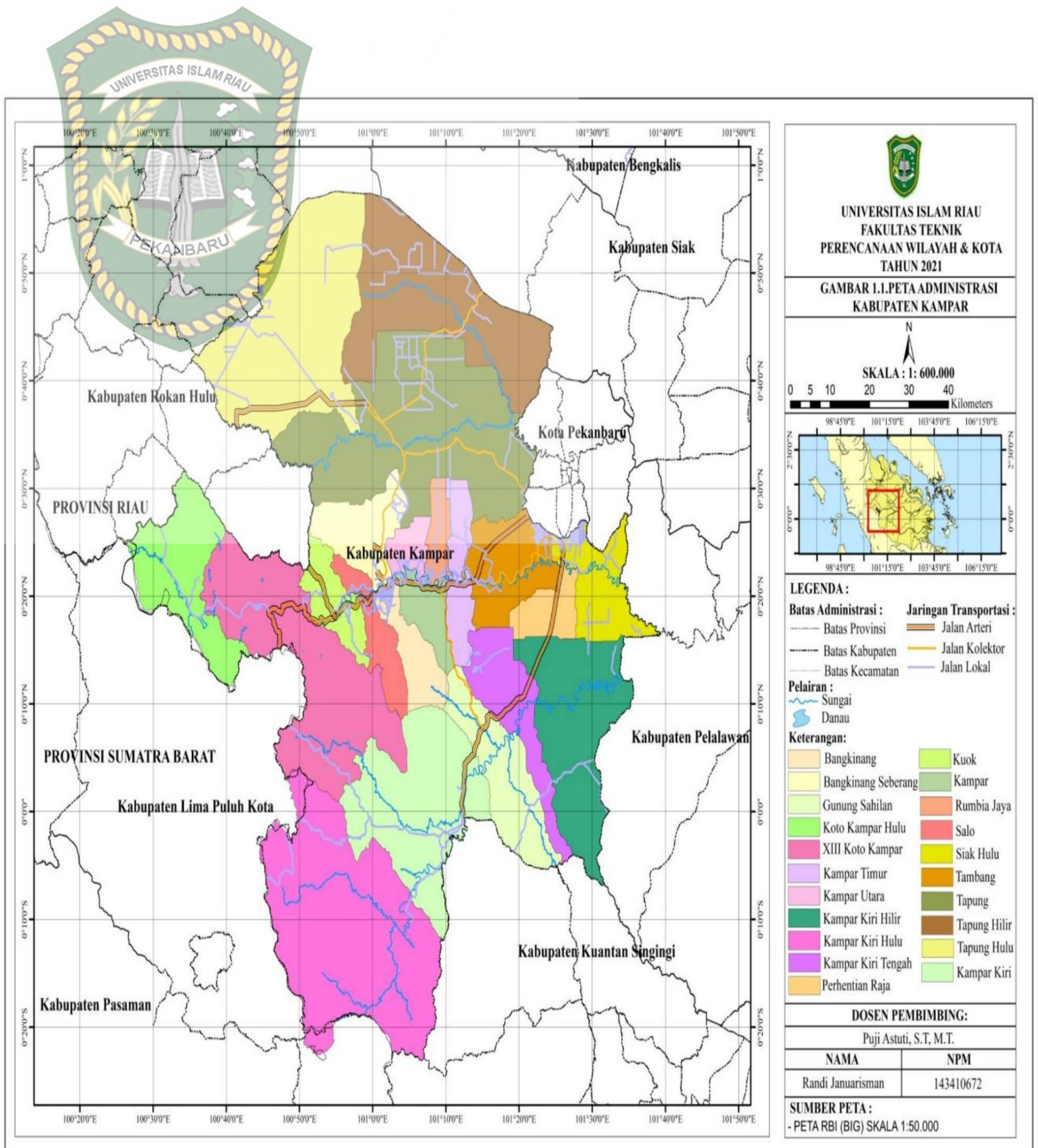


Kelurahan Air Tiris. Kecamatan Kampar tidak ada wilayahnya yang berbatasan dengan laut, namun sebagian wilayahnya yang berbatasan dengan sungai, sebagai batas alam dengan kecamatan lain.

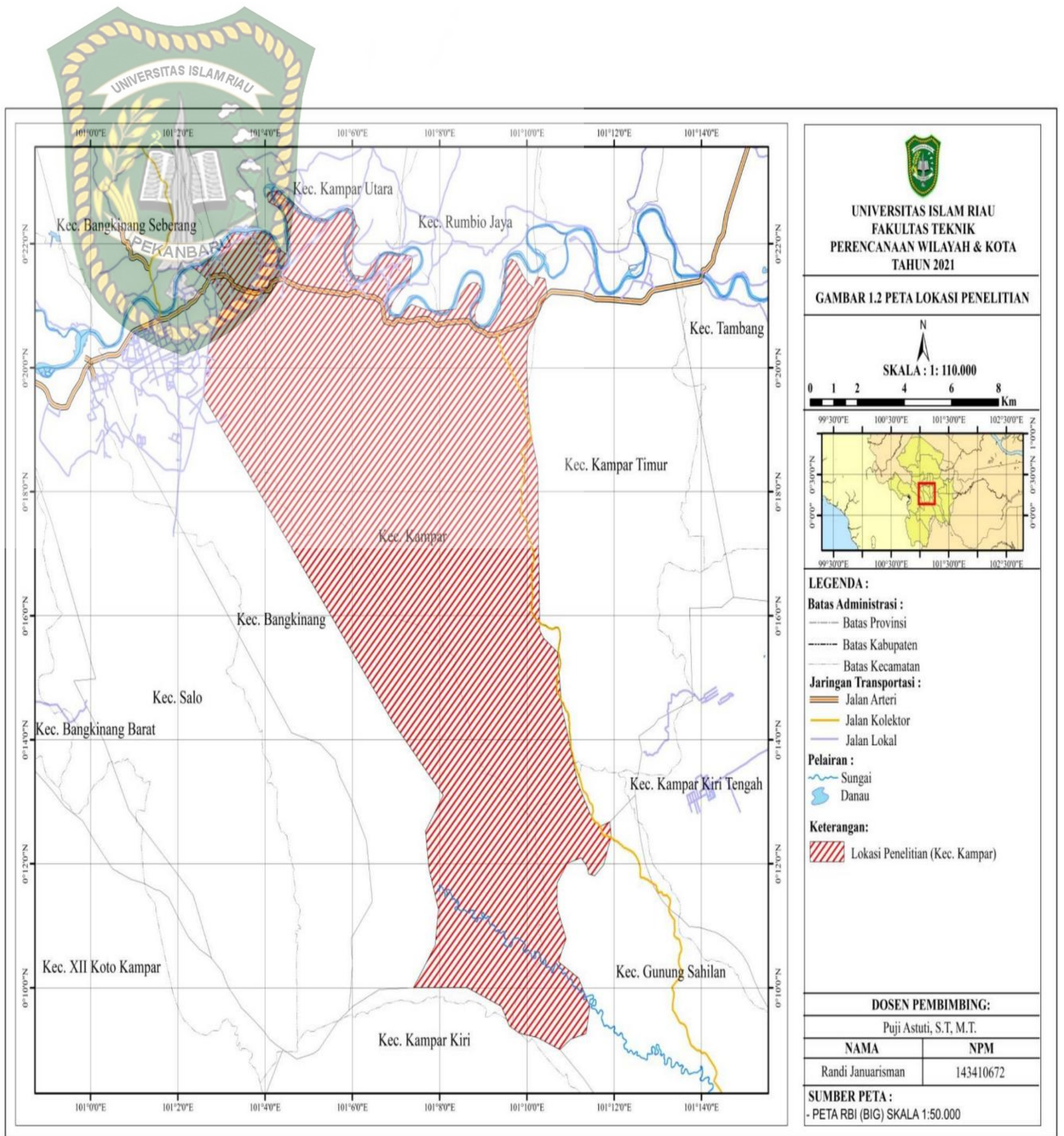
Batas wilayah Kecamatan meliputi;

- a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara
- b. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri
- c. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang
- d. Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur

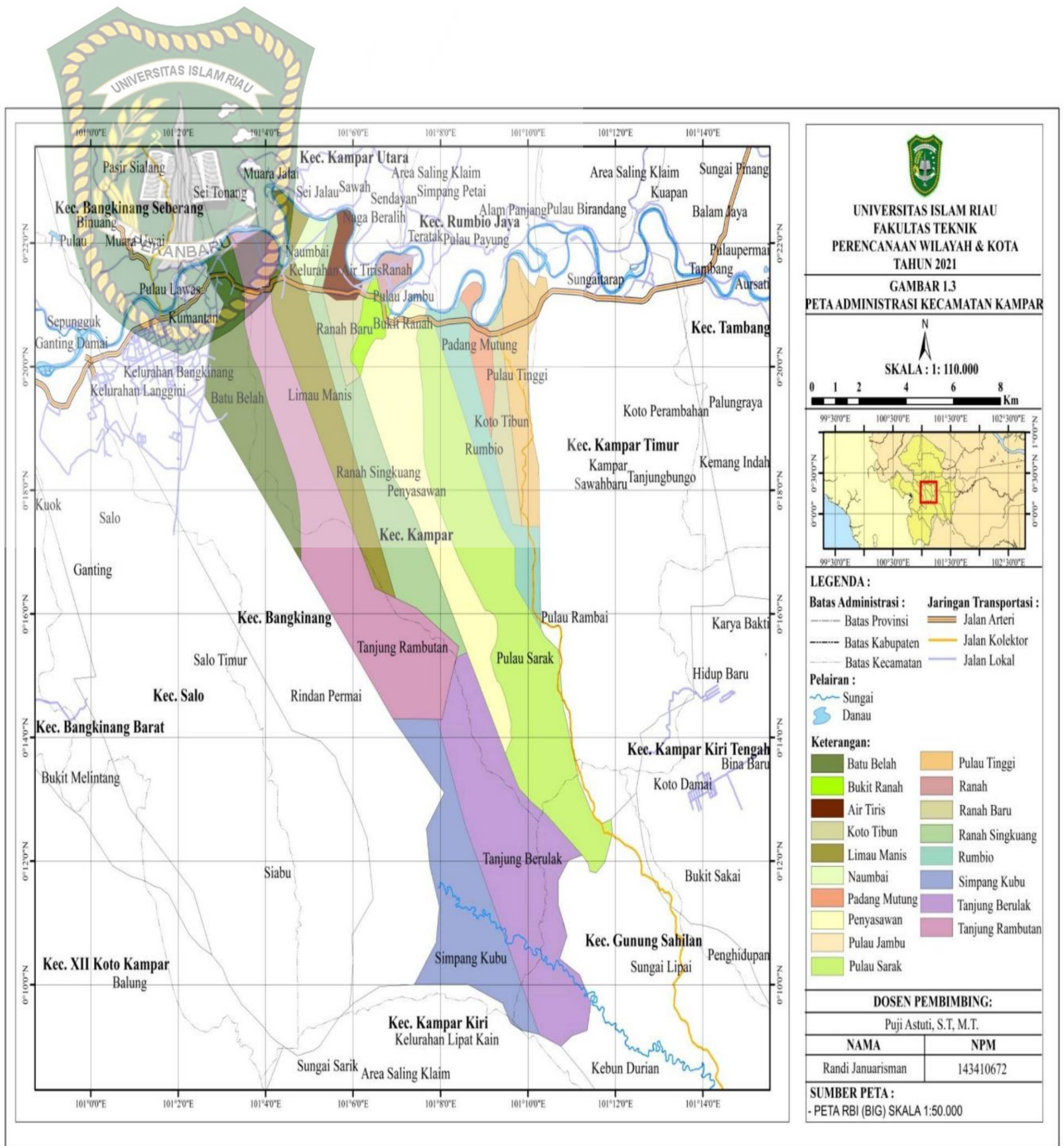
Desa yang terluas di Kecamatan Kampar adalah Desa Batu Belah dengan luas sekitar 35,99 km² atau sekitar 25,05 % dari luas Kecamatan Kampar. Daerah kecamatan Kampar pada umumnya terletak didaerah dataran/hamparan yang dilalui oleh Sungai Kampar dan perkebunan.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kampar



Gambar 1.2 Peta Lokasi Penelitian



Gambar 1.3 Peta Administrasi Kecamatan Kampar



1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar proses analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.
- c. Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kampar, dengan menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Analisis SWOT dimaksud untuk memperjelas semua kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi guna memberi suatu rekomendasi



pengembangan berdasarkan potensi-potensi yang tersedia. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

1.7 Kerangka Berfikir

Pengertian kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis premis dasarnya.

Kerangka berfikir ini adalah alternatif atau jalan keluar yang paling optimal dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu jalan keluar yang akan diberikan diantaranya dengan membuat secara diagramatis atau kerangka berfikir, yang mana didalamnya terdapat permasalahan yang akan dibahas yang akan di rangkum di dalam

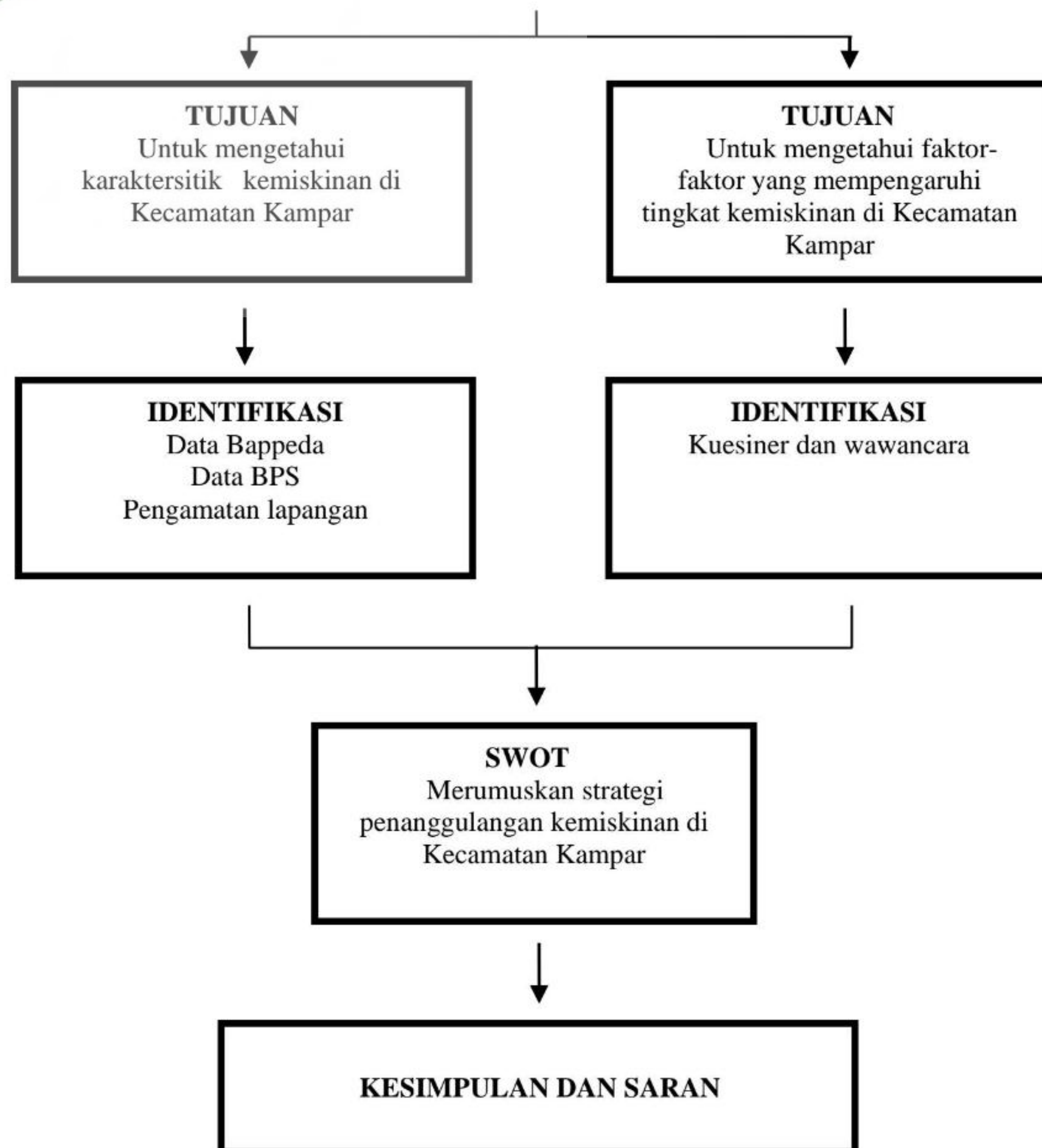


rumusan masalah kemudian diidentifikasi dan menemukan sasaran yang akan dilakukan dengan menggunakan metode apa selanjutnya menentukan analisis apa yang digunakan agar dapat memecahkan persoalan yang akhirnya menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan dan di rangkum dalam kesimpulan dan saran yang mana dapat dilihat dari pada Gambar 1.3 berikut ini :



LATAR BELAKANG

Kemiskinan di Kecamatan Kampar terbilang cukup tinggi. Kecamatan Kampar adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar. Menurut Basis Data Terpadu Kampar 2018, Kecamatan Kampar merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan dana bantuan miskin tinggi di Kabupaten Kampar. Banyak faktor penyebab terjadinya kemiskinan, baik berupa, tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan penduduk, jumlah tanggungan dan lainnya, maka dari itu dibutuhkan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efektif.



Gambar 1.4 Kerangka Berfikir



1.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan didasarkan atas beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang konsepsi dasar kemiskinan, pandangan tentang kemiskinan, indikator kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, karakteristik kemiskinan, teori strategi dalam mengatasi kemiskinan, perencanaan pembangunan belum dapat mengatasi kemiskinan, pembangunan dan kemiskinan dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, jenis data penelitian, tahapan penelitian, populasi dan teknik sampel, teknik analisis, dan desain survei.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN



Pada bab ini akan di bahas tentang gambaran umum wilayah penelitian, gambaran umum karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar, gambaran umum faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan Kampar.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas analisis karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Kampar, dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kampar dengan menggunakan analisis SWOT.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian dari penelitian ini dan saran-saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini.



2.1 Konsep Dasar Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Menurut Ritonga (2003) bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



“Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS Al-Baqarah [2]:233).

Kemiskinan merupakan teori, fakta dan kebijakan bahkan masalah yang sudah sejak lama dan hampir dapat dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi”. Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang penting dalam pembahasan pembangunan.

Menurut Sumodiningrat dkk (1999) pengertian kemiskinan adalah sebuah konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak ikutan dari pembangunan didalam kehidupan. Kemiskinan dipandang sebagai suatu dari permasalahan dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal (Levitan, 1980). Hal ini sesuai dengan definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Bradly R Schiller bahwa kemiskinan ialah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai dalam memenuhi



kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas (Murin dkk, 1979).

Kemiskinan dapat digambarkan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Salim, 1984). Dalam kaitannya dengan hal ini, World Bank mendefinisikan keadaan miskin sebagai: *“Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society”* (World Bank, 1990).

Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan itu hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimal yang mungkin seseorang bisa hidup layak. Apabila tingkat pendapatan tidak memenuhi kebutuhan minimal, maka orang atau rumah tangga itu bisa digolongkan keluarga miskin.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan perekonomian, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi yang tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak memiliki peluang serta kemampuan yang mumpuni untuk



mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset produktif, sehingga semakin lama menjadi semakin terbelakang. Dalam prosesnya, gejala tersebut menciptakan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan.

2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan

Kondisi kemiskinan dapat mendorong tindakan yang bisa dinilai sebagai perbuatan yang melawan nilai kemanusiaan. Sudah tentu mereka yang hidup didalam kondisi kemiskinan (*the have nots*) akan membangun atau membentuk nilai-nilai sendiri yang khas dan tidak serupa dengan kelompok lain.

Sebagai contoh, kebiasaan orang miskin hidup didalam kekurangan membuat cara hidup mereka tidak bisa memiliki kadar kebersihan sebagaimana golongan atas, hal ini disebabkan oleh:

- a. Dari segi waktu, mereka kebanyakan tidak cukup mempunyai waktu untuk memikirkan hal lain diluar usaha mencari sesuap nasi.
- b. Dari segi ketersediaan fasilitas, memang tidak memungkinkan suasana yang bersih. Bagaimana orang yang tinggal di kolong jembatan atau di pinggir kali bisa mempunyai kebiasaan bersih



(menjaga kebersihan) apabila kondisi lingkungannya lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah yang mapan. Selain itu, cara komunikasi mereka yang biasa tinggal dalam hiruk pikuk jalan, kebisingan yang tinggi, tentu saja akan terbiasa bersuara keras (volume suara). Mungkinkah tradisi ini diterima ? Apakah dapat diterima oleh norma-norma kesopanan dan etika golongan elit?

Jika nilai dari golongan atas dipakai sebagai titik pijakan dan ukuran dalam menilai tingkat realisasi kemanusiaan, maka dengan sendirinya mereka yang bergelimang dalam kemiskinan dapat dikatakan hidup dalam kondisi kemanusiaan yang rendah. Sebagai contoh antara lain :

- a. Ditempat pembuangan sampah, rombongan orang saling berebut barang (sampah) yang baru diturunkan dari truk pengangkut.
- b. Pagi hari ketika kereta api masuk stasiun, anak-anak gelandangan saling berebut makanan bekas, sisa-sisa makanan dari penumpang.
- c. Pemulung yang masih mau memakan makanan bekas yang sudah ada di tempat sampah.

Dengan demikian dapat diartikan jika kemiskinan menjadi



kenyataan yang tidak memungkinkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia tumbuh secara normal. Masih adanya kemiskinan dengan sendirinya memberikan bukti bahwa keadaan kemanusiaan masih sangat memperhatikan. Dalam keadaan tersebut, pembahasan mengenai martabat (kemuliaan) manusia hanya sebatas bagi mereka yang dalam posisi mapan, akan tetapi belum bisa menyentuh mereka yang dihinakan karena hidup dalam kemiskinan dan menderita.

2.2 Pandangan Tentang Kemiskinan

Menurut Sutrisno (1999), kemiskinan adalah sebuah pertanyaan yang tidak menarik dan sekaligus berbahaya. Pertanyaan tentang sebab tersebut pada akhirnya akan menuju pada proses kemiskinan bagaimana orang menjadi miskin. Tentu saja banyak pandangan yang berusaha untuk menjelaskan adanya kemiskinan tersebut. Berikut akan dibahas mengenai tiga pandangan tentang kemiskinan.

2.2.1 Pandangan Konservatif

Pandangan ini beranggapan bahwa pasar bebas bisa menjadi pondasi bagi kebebasan ekonomi dan politik, serta akan memungkinkan demokrasi. Perbedaan dikalangan masyarakat semata-mata dipandang hanya akibat dari perbedaan individu, pembawaan bakat dan karakter,

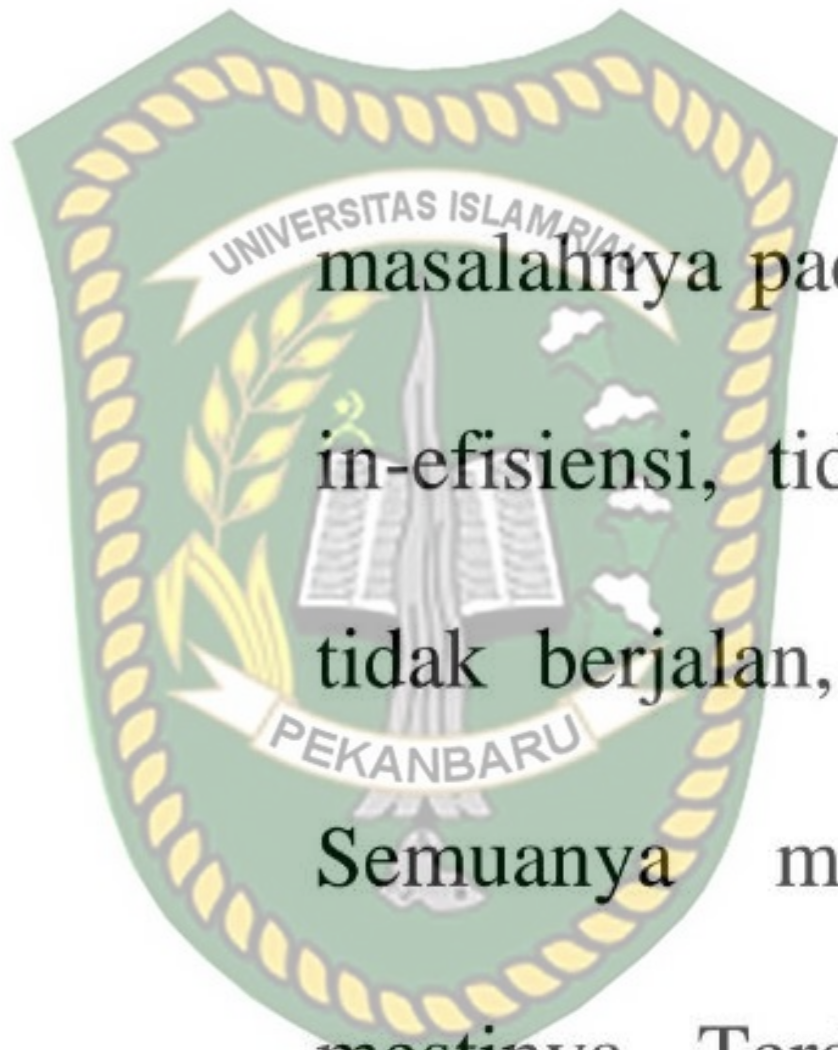


termasuk motif hidup. Tidak ada masalah dalam sistem, karna sistem telah dianggap final atau tidak dapat dibantah. Bahkan pandangan ini diyakini bahwa pada masa depan akan terjadi suatu kondisi yang menguntungkan bagi semua kalangan (Sutrisno, 1999).

Jika sekarang terdapat golongan miskin, maka menurut pandangan tersebut, pangkal permasalahan ada pada orang miskin itu sendiri. Mereka yang miskin itu dinilai pemalas, bodoh dan tidak punya keinginan untuk maju, kurang keahlian dan hidup dalam kebudayaan yang anti kemajuan (anti modernisasi). Secara prinsip pandangan ini mendekati masalah dari sisi urban dan lebih cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, untuk merubah mereka yang miskin tersebut, oleh karena itu, dilakukan intervensi, terutama bagi rekayasa individu mengubah mentalitas si miskin agar memiliki daya hidup dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan. Pendidikan untuk mendorong motivasi seseorang, pemberian pelatihan keterampilan, dapat dikatakan bersumber pada pandangan ini.

2.2.2 Pandangan Liberal

Dalam pandangan ini, sistem dianggap tidak bermasalah, letak



masalahnya pada bagaimana sistem tersebut bekerja. Adanya kebocoran, in-efisiensi, tidak adanya kontrol, korupsi, kolusi, nepotisme, hukum tidak berjalan, dan lain-lain, dipandang sebagai sumber masalah. Semuanya menunjukkan bahwa sistem tidak berjalan bagaimana mestinya. Terdapat distorsi yang mengakibatkan fungsi dasar sistem menjadi tumpul, dan di sisi lain menjadi faktor yang mempersempit kesempatan pada sebagian orang dan membuka kesempatan pada bagian yang lain (khususnya yang berada dekat dengan kekuasaan). Pada prinsipnya pandangan ini tidak mempersoalkan struktur sosial, sehingga arah perubahannya tidak akan sampai pada perubahan struktur sosial (Sutrisno, 1999).

Terhadap kemiskinan, golongan ini berpendapat, bahwa adanya kemiskinan diakibatkan kesempatan yang tidak sama yang merupakan sebagai akibat dari manajemen yang kacau balau serta tidak profesional. Oleh karena itu, jika orang miskin diberi peluang berusaha, maka masalah kemiskinan akan bisa ditangani. Pada sisi lain, untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan kontrol publik. Untuk keperluan itu diperlukan adanya jaminan agar masyarakat bebas dari segala tata aturan yang



menghambat gerak maju mereka, dan dengan itu diharapkan masyarakat bisa menjalankan fungsi kontrol yang ketat, termasuk menghidupkan supremasi hukum. Usaha-usaha yang kini berkembang dalam skema gerakan reformasi, dapat dikatakan sebagai model dari pandangan liberal.

2.2.3 Pandangan Transformatif

Berbeda dengan dua pandangan diatas, pandangan ini berangkat dari sistem struktur dan kultural sosial sebagai titik persoalan. Ketidakadilan bersumber terhadap sistem yang bukan saja memungkinkan ketidakadilan, tetapi juga menghadirkan ketidakadilan itu sendiri. Dalam pandangan transformatif, persoalan yang kini berkembang tidak akan pernah dapat dituntaskan, selama sistem tidak mengalami transformasi, diubah dengan sistem baru yang berdiri diatas pondasi keadilan (Sutrisno, 1999).

Dalam kasus perubahan, sebagai contoh pandangan transformatif akan melihat kemiskinan pada sektor buruh sebagai akibat dari hubungan produksi yang tidak adil. Para buruh hanya menjadi objek, pihak yang menjual tenaga untuk mendapatkan bayaran, dan sama sekali tidak



mempunyai andil untuk menentukan proses produksi termasuk menentukan besarnya gaji yang selayaknya mereka dapatkan. Di sektor pertanian, kemiskinan para petani dipandang sebagai akibat ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria (termasuk tanah); sehingga para petani tetap tidak bisa hidup dalam kecukupan, namun sebaliknya malah mengalami penindasan yang panjang. Dua kasus ini merupakan contoh dari akibat yang lebih dalam dari ketidakadilan yang termuat dalam sistem. Usaha usaha untuk menaikkan gaji buruh, harga gabah, tanpa melibatkan perubahan yang mendasar, terbukti tidak banyak memberikan arti pada perbaikan kehidupan perekonomian masyarakat.

Kemiskinan bukan diakibatkan dari kesalahan si miskin, tidak pula dilihat sebagai salah arus, melainkan sebagai akibat struktur, terutama yang berkaitan dengan aset produksi yang timpang, sehingga memungkinkan pihak lain menentukan dan sekaligus menjadi penikmat pertama dari segala hasil. Masalah kemiskinan tidak bersifat spesifik hanya ada satu daerah, melainkan harus ditinjau secara makro, termasuk sistem dunia yang menjadikan negara-negara utara lebih maju dari negara-negara selatan. Pola hubungan utara-selatan dalam kerangka ini menjadi penting untuk dipermasalahkan. Dalam pandangan ini, hubungan



kekuasaan laki-laki dan perempuan menjadi bagian dari masalah yang perlu ditransformasikan, agar tercipta suatu keadilan bagi semua orang.

2.3 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan sebab terjadinya kemiskinan di perkotaan, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

BAPPENAS merumuskan Indikator-indikator kemiskinan dengan rumusan yang konkrit berikut:

- a. minimnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari ketersediaan pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20% masyarakat dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, dialami oleh 60% penduduk berpenghasilan rendah (BPS, 2004);
- b. minimnya akses dan rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya



perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas.

Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1% dibanding 82,3% pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74% penduduk, dan hanya sebagian kecil di antara penduduk miskin; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang diakibatkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung;

- c. minimnya kesempatan kerja serta usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga;
- d. minimnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat



miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan sanitasi yang tidak memadai;

- e. minimnya akses terhadap air bersih. Susah untuk mendapatkan air bersih diakibatkan oleh terbatasnya sumber air dan menurunnya mutu sumber air;
- f. ketiadaan kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidak pastian dalam penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian;
- g. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang berdomisili di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat



bergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;

- h. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa kurun waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 jutaj iwa menjadi pengungsi.

Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi tahun 2001 diperkirakan masih terdapat lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai wilayah konflik;

- i. kurangnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menandakan kurangnya komunikasi dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam merumusan kebijakan juga diakibatkan karena kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;
- j. tingginya beban kependudukan yang diakibatkan oleh tingginya tanggungan keluarga dan tekanan hidup yang mendorong terciptanya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah



tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di pedesaan adalah 4,8 orang.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Utama Kemiskinan

INDIKATOR	KETERANGAN
Ekonomi rendah	Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
Terbatasnya sarana dan prasarana	Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; Terbatasnya akses terhadap air bersih; Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
Terbatasnya perlindungan sosial dan politik	Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; Lemahnya jaminan rasa aman; Lemahnya partisipasi; Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap

Hasil Teori, 2021



2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan antara lain :

A. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja (Hartomo dan Aziz dalam Hudyana, 2009). Menurut Kuznets dalam Suryandari (2017) menyatakan pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006) taraf pendidikan yang rendah



mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2005). Siregar dan Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

B. Status Pekerjaan



Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur produktivitas antara lain adalah status kerja, jenis pekerjaan, jumlah hari kerja, dan jam kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Hartomo dan Aziz dalam Hudyana (2009). Menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006) selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

Dasar-dasar teori faktor pekerjaan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.2 Sintesis Faktor Pekerjaan

Tokoh	Pernyataaan
Friedmann, 1979	Kemiskinan mendefinisikan sebagai ketidakseimbangan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi: network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan.
Adler Karlsson, 1978	Tenaga kerja juga harus termasuk didalam pengukuran kemiskinan absolute.



Herlianto, 1997

Suatu penelitian dalam masyarakat akan menunjukkan ruwet dan kompleksnya hubungan di antara berbagai manifestasi kemiskinan: pengangguran.

Hasil Teori, 2021

C. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan (Hartomo dan Aziz dalam Hudyana, 2009).

D. Jumlah Tanggungan Keluarga

Semakin besar jumlah tanggungan keluarga semakin berat beban rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya (Firdaus, 2006). Program keluarga berencana (KB) menyatakan bahwa rumah tangga keluarga berencana di programkan memiliki anak dua orang atau jumlah tanggungan dalam keluarga sebanyak tiga orang (Firdaus, 2006).

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi



(Hartono dan Aziz dalam Hudyana, (2009).

Jumlah anggota rumah tangga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota keluarga akan semakin besar pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Sehingga menurut masyarakat miskin, jumlah anggota keluarga yang banyak akan mengakibatkan kondisi menjadi semakin miskin. Menurut Rivani (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi kemiskinan. Alasan jumlah tanggungan keluarga yang banyak, dapat disebabkan oleh beberapa penyebab antara lain, banyak anak, ada anggota keluarga yang tidak produktif (usia lanjut atau alasan lain) dan kesulitan memperoleh pekerjaan bagi anggota keluarga yang sebenarnya sudah mencapai usia produktif. Rumah tangga miskin memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sekitar satu orang lebih banyak dibanding mereka yang tidak miskin, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hubungan jumlah anggota rumah tangga yang besar dengan kemiskinan bersifat saling memperkuat. Di satu sisi, rumah tangga miskin cenderung mempunyai anak lebih banyak. Hal itu tidak



lepas dari anggapan bahwa anak adalah jaminan masa depan bagi si orang tua. Di sisi lain, rumah tangga dengan jumlah anak yang lebih banyak cenderung menjadi miskin karena untuk suatu tingkat pendapatan tertentu harus dipakai untuk menghidupi lebih banyak anggota rumah tangga (TNP2K, 2010).

E. Pendapatan Penduduk

Menurut Kuncoro (2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Kenyataan menunjukkan kemiskinan tidak dapat didefinisikan dengan sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan



memenuhi kebutuhan material, tetapi juga kuat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Menurut Bank Dunia (2003), terdapat beberapa faktor dasar dari kemiskinan dipandang dari sisi sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
- b) kurang ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- c) terdapat perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- d) kurang produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
- e) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.5 Karakteristik Kemiskinan

Alkire dan Foster pada tahun 2007 mengembangkan ukuran kemiskinan baru yang dinamakan *Multidimensional Poverty Index* (MPI). MPI menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga/individu dan telah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. MPI memiliki tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Setiap dimensi



terdiri dari beberapa indikator, masing-masing dua indikator untuk dimensi kesehatan dan pendidikan, serta enam indikator untuk dimensi standar hidup.

a. Indikator pada dimensi kesehatan adalah gizi dan kematian anak.

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kebutuhan kesehatan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga.

b. Indikator pada dimensi pendidikan adalah tahun lama bersekolah dan partisipasi sekolah untuk semua anak usia sekolah. Indikator ini digunakan untuk menangkap akses rumah tangga terhadap pendidikan, namun belum mencerminkan kualitas pendidikan itu sendiri.

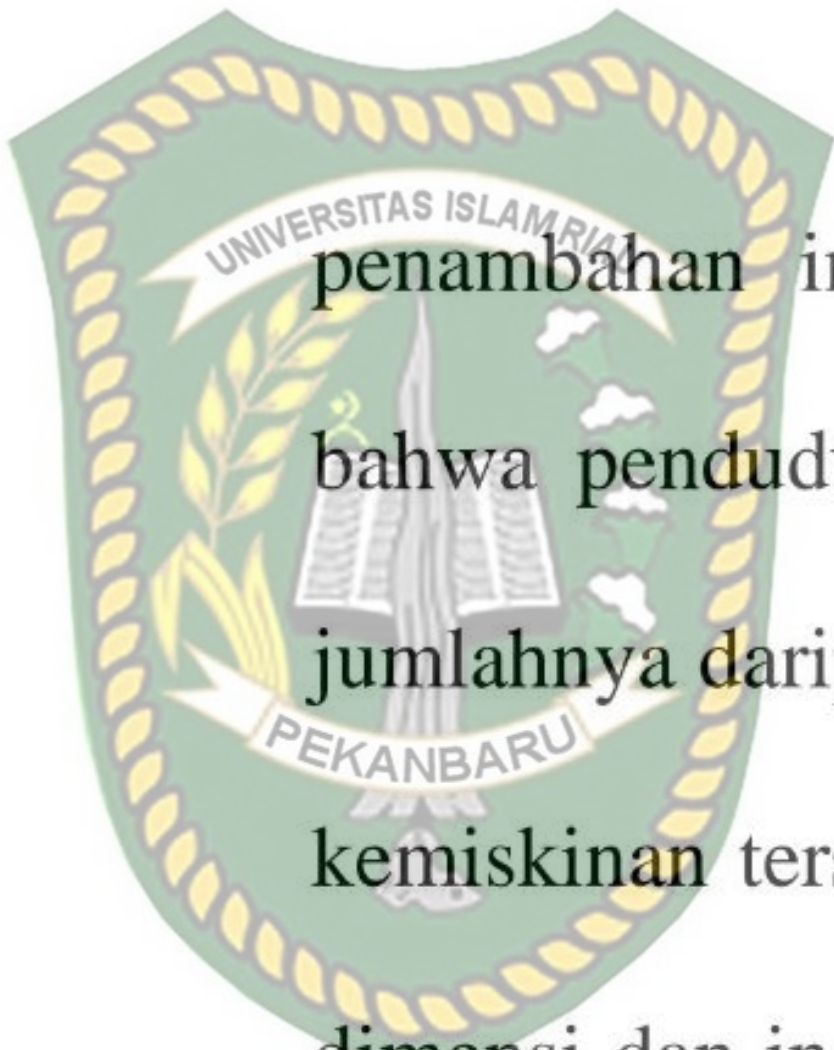
c. Indikator pada dimensi standar hidup adalah bahan bakar memasak, sanitasi layak, air minum bersih, listrik, lantai, dan kepemilikan beberapa barang konsumsi (radio, televisi, telepon, sepeda, sepeda motor, mobil, truk, dan kulkas).

Dalam pengukuran multidimensi, setiap dimensi memiliki garis kemiskinan masing-masing. Hal ini menyebabkan identifikasi kelompok miskin menjadi lebih kompleks karena menggunakan beberapa ambang batas ganda. Ambang batas pertama menyerupai garis kemiskinan untuk



tiap-tiap dimensi yang mengidentifikasi apakah seseorang tergolong miskin. Ambang batas kedua dilakukan sebagai penentuan terakhir, yakni apakah orang tersebut tergolong sebagai orang miskin berdasarkan keseluruhan dimensi. Adapun nilai bobot berkisar antara 0 - 1. Bobot tersebut diinterpretasikan bahwa setiap orang yang terdeprivasi atau miskin dalam satu dimensi akan diberi bobot tertentu.

MPI Global dibangun menggunakan tiga dimensi dan indikator yang serupa dengan Alkire Foster, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan menggunakan MPI, Alkire dan Santos (2010) menemukan bahwa 1,7 miliar orang di dunia hidup dalam kemiskinan multidimensi dan umumnya tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Di tahun yang sama, Wardhana (2010) mencoba mengembangkan MPI khusus untuk Indonesia. Kajian ini membandingkan kemiskinan multidimensi dengan kemiskinan moneter di Indonesia pada tahun 1993 dan 2007. Pemilihan dimensi dalam membangun MPI relatif sama, yakni menggunakan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, namun beberapa indikator dimodifikasi karena keterbatasan data. Data indikator gizi anak yang tidak tersedia dimodifikasi dengan indikator kondisi kesehatan yang disertai dengan



penambahan indikator jaminan kesehatan. Kajian ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia secara multidimensi lebih besar jumlahnya daripada penduduk miskin secara moneter, namun kedua jenis kemiskinan tersebut memiliki korelasi yang positif. Modifikasi terhadap dimensi dan indikator MPI Alkire dan Foster memang sering dilakukan karena keterbatasan data dan perbedaan permasalahan yang dihadapi tiap negara. Indikator-indikator untuk dimensi kesehatan yang dianggap dapat mencerminkan akses rumah tangga terhadap kebutuhan dasar kesehatan adalah jaminan kesehatan, kondisi kesehatan, vaksinasi, nutrisi anak, dan proses persalinan. Sementara itu, dimensi pendidikan tidak mengalami banyak modifikasi, tetapi ada beberapa penelitian yang menambahkan indikator buta huruf. Indikator buta huruf lebih mencerminkan kualitas pendidikan karena indikator yang digunakan oleh Alkire dan Foster belum mencakup kualitas pendidikan. Modifikasi terhadap indikator dalam dimensi standar hidup juga terbilang sedikit. Umumnya, dimensi standar hidup diukur dari indikator yang menggambarkan keseharian hidup rumah tangga seperti air minum bersih, sanitasi, listrik, bahan bakar memasak, kondisi rumah (lantai, dinding dan atap rumah), dan kepemilikan aset.



Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumberdaya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk



mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Harry (2007) mengemukakan terdapat dua jenis kemiskinan, yaitu:

a. Kemiskinan yang bersifat kronis (*chronic poverty*)

Ciri dari kemiskinan ini diantaranya adalah sangat terbatasnya infrastruktur transportasi yang menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil, sering mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, serta tidak memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan. Kemiskinan jenis ini biasanya akan menghasilkan keturunan yang miskin juga, sehingga jenis ini sering dikaitkan dengan kemiskinan antar generasi.

b. Kemiskinan yang bersifat sementara (*transient poverty*)

Yakni kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya membaik, maka mereka akan dapat hidup normal dan



lebih baik.

Menurut Chambers (1998) dalam Chriswardani (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi sebagai ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain:

a. Kemiskinan (*proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan- kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.



c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan di anggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

d. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber



pendapatan.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- c. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga



- bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- d. Berada di kawasan pedesaan atau dikawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*)
- e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak di identifikasikan atau diukur.

2.6 Teori Strategi Dalam Mengatasi Kemiskinan

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan



komplek, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa kemasa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling signifikan, dan relevan. Pengajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus diupayakan. Adapun teori dan pendekatan dalam mengatasi kemiskinan antara lain:

a. Teori Neo-Liberal

Shanon, Kpicker, Cheyne, O'Brien, dan Belgrave beragumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individual yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

b. Teori Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi dikalangan masyarakat tertentu.

Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori marjinal, konsepnya yang terkenal adalah *culture of poverty*, menurut Luwis



masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerahkan pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi.

c. Teori Development

Teori Development (bercorak pembangunan) muncul dari teori-teori pembangunan terutama Neo-Liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Ada tiga asumsi dasar pada teori ini:

- Negara menjadi miskin karena ketidakadaan atribut industrilisasi, modal, kemampuan majerial, dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah tetimpangan.
- Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

Ketiga asumsi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan yang



terjadi bukan persoalan budaya sebagaimana anggapan teori marjinal melainkan adalah persoalan ekonomi dan pembangunan.

d. Teori Struktural

Teori ini didasari oleh pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank (1967) *Capitalis and the Underdevelopment in Latin Amerika*, dan juga oleh Teothonio Dos Santos dan Samir. Teori structural berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karna persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan politik ekonomi Dunia.

2.7 Perencanaan dan Program Pembangunan Belum Dapat Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada abad ini terlihat telah berhasil membawa kesejahteraan dan berbagai kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Meskipun kemudahan hidup dengan munculnya teknologi baru telah menggiring manusia ke arah kehidupan manusia yang lebih baik dan sejahtera, tetapi ternyata hanya sebagian saja yang dapat menikmati kemajuan itu, sebagian lainnya masih tetap bergelimang dengan kehidupan tradisional (Sairin

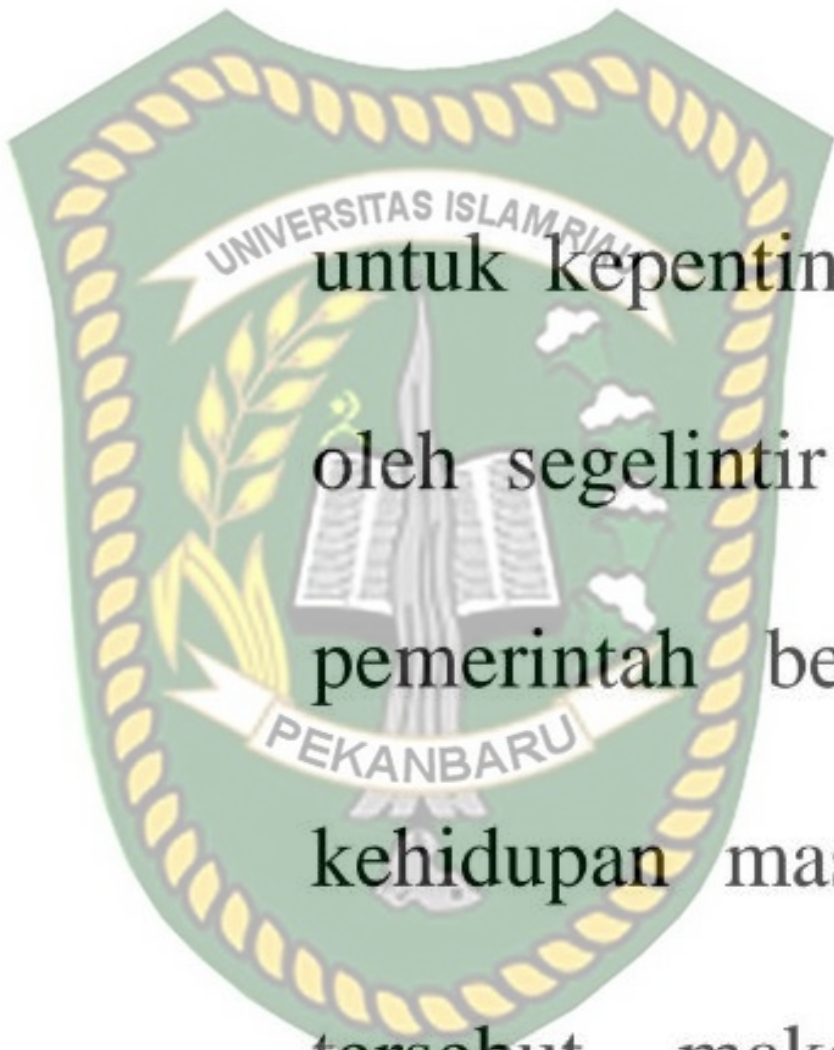


2002). Menurut Chambers (1987) kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan lebih tepat disebut sebagai perangkat kemiskinan. Lima unsur penyebab kemiskinan yang saling terkait yaitu : ketidakberdayaan, kerawanan atau kerentanan, kelemahan fisik, kemiskinan, dan isolasi. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah “pusat - periferi”. Pola hubungan antara pusat-periferi ini dijelaskan oleh Frank bahwa kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju.

Dampak dari ketergantungan ini terhadap dunia ketiga adalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan kekayaan,



eksploitasi tenaga kerja, serta terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia ketiga itu sendiri. Asumsi dasar teori dependensi ini menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan. Hal ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teoritis dependensi diatas bahwa kemiskinan di suatu negara disebabkan karena faktor eksternal. Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya. Munculnya kemiskinan juga diakibatkan oleh bias pembangunan yang hanya bertumpu pada filsafat ketergantungan (dependensi) terhadap negara-negara maju dan modern. Jika pola dan ideology pembangunan masih tetap seperti itu dengan mengadopsi teori dan praktek ideology barat, maka pembangunan Indonesia akan menyisakan sejumlah persoalan seperti kemiskinan. Faktanya pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, belum menyentuh kepentingan masyarakat secara universal dan komprehensif, pembangunan hanya mampu diperuntukan



untuk kepentingan para pemilik modal, pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Paradigma pemerataan yang dihembuskan oleh pemerintah belum bisa diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari biasanya pembangunan tersebut, maka terciptalah masyarakat miskin. Karena itu, model pembangunan seharusnya bertumpu pada keinginan masyarakat, sebab kenyataannya antara keinginan pemerintah sebagai elit pembangunan seringkali bersebrangan dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

2.8 Pembangunan dan Kemiskinan

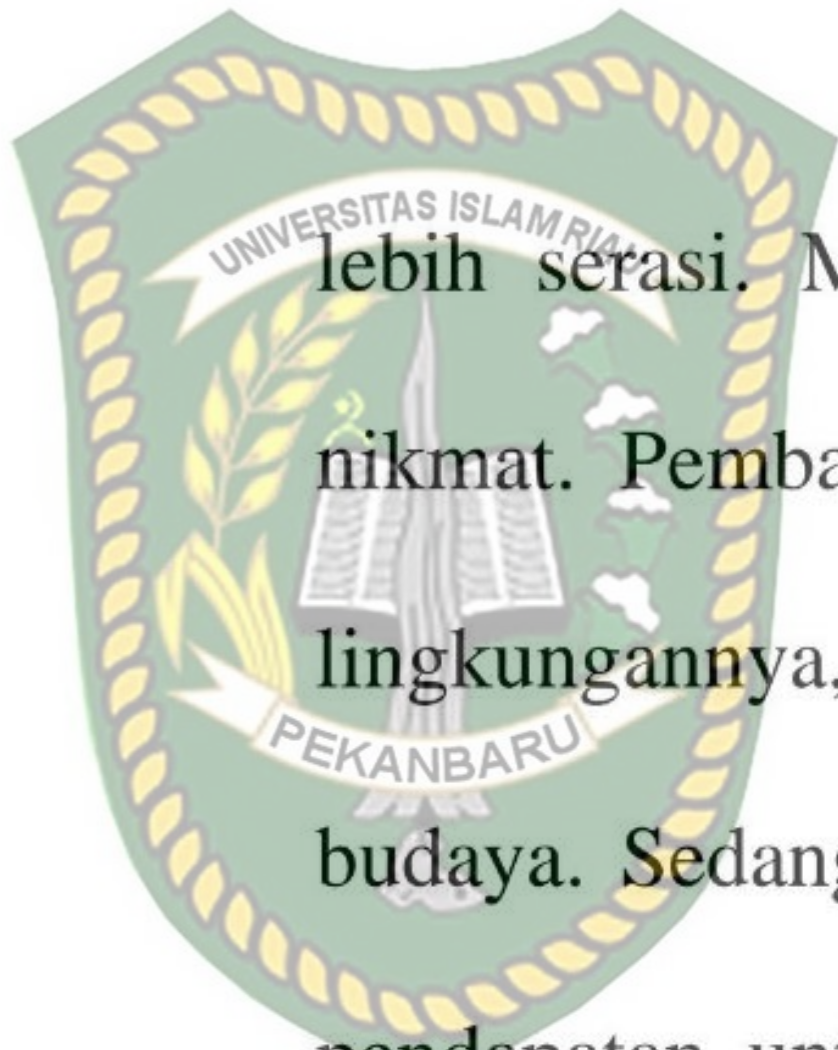
Semarang, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan buruknya tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia, disebabkan belanja pemerintah yang tidak efektif. Termasuk, pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen juga belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi Indonesia masih mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang terus bertumbuh. Padahal, pertumbuhan perekonomian dalam negeri sedang bagus.



Enny menjelaskan, apabila persoalan ketimpangan ekonomi ini tidak segera dicarikan jalan keluar, dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan berkelanjutan. “Cuma problemnya adalah kemiskinan relatif atau ketimpangan. Ketimpangannya kan naik. Ketimpangan ini jadi problem berat dan PR bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Enny. Lebih lanjut Enny menjelaskan, ketimpangan di Tanah Air bukan rahasia lagi. Masalah kemiskinan muncul karena ketidakadilan.

Cita-cita bangsa Indonesia yang menghendaki adanya pemerataan kesejahteraan, hingga kini belum terpenuhi. Akibatnya, jurang ketimpangan ekonomi semakin lebar. “Kemiskinan absolut memang menurun. Tapi kemiskinan dari sisi kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan semuanya memburuk,” pungkasnya.

Menurut para sarjana sains sosial dan kemanusiaan, pembangunan adalah sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang sifatnya lebih menyeluruh. Pembangunan itu pula dibagi kepada dua kategori besar. Pertama, pembangunan yang direncanakan, dan kedua pembangunan yang tidak direncanakan. Namun jika dilihat dari segi kebudayaan, pembangunan tidak lain adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Menciptakan lingkungan hidup yang



lebih serasi. Menciptakan kemudahan atau fasilitas agar hidup lebih nikmat. Pembangunan adalah suatu intervensi manusia terhadap alam lingkungannya, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial budaya. Sedangkan kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain. (Salim, 1982). Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur. Garis kemiskinan, yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh tiga hal: (1) persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, (2) posisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan (3) kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi. Kesemuanya dapat tersimpul dalam barang dan jasa serta tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi penetapan pendapatan minimal yang diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimal. Di Indonesia pola



perkembangan pembangunan juga mengikuti pendapatan yang dikemukakan Kuznets, artinya golongan miskin kurang terjamah oleh hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Mengapa mereka tidak terangkat, padahal pemerintah telah mengambil kebijaksanaan penyebaran proyek-proyek ke daerah-daerah ke desa-desa. Bila diteliti golongan-golongan miskin yang tidak terjamah oleh hasil-hasil pembangunan karena:

- a. Ketimpangan dalam peningkatan pendidikan. Selama belum ada kewajiban belajar golongan miskin tidak akan mampu berpartisipasi mengenyam peningkatan anggaran pendidikan.
- b. Ketidakmerataan kemampuan untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi diperlukan tingkat pendidikan, keterampilan, relasi, dan sebagainya. Golongan miskin tidak memilikinya .
- c. Ketidakmerataan pemilikan alat-alat produksi. Golongan miskin tidak memiliki alat-alat produksi, penghasilannya untuk makan saja sudah susah, sehingga tidak mungkin untuk membentuk modal.
- d. Ketidakmerataan kesempatan terhadap modal dan kredit ada. Modal dan kredit pemberiannya menghendaki syarat-syarat



tertentu dan golongan miskin tidak mungkin memenuhi persyaratannya.

- e. Ketidakmerataan menduduki jabatan-jabatan. Untuk mendapat pekerjaan yang memberi makan pada keluarga saja susah, apalagi menduduki jabatan-jabatan yang sering memerlukan relasi tertentu dan persyaratan tertentu.
- f. Ketidakmerataan mempengaruhi pasaran. Karena miskin dan pendidikannya rendah, maka tidak mungkin golongan miskin dapat mempengaruhi pasaran.
- g. Ketidakmerataan kemampuan menghindari musibah misalnya penyakit, kecelakaan dan ketidak beruntungan lainnya. Bagi golongan miskin dibutuhkan bantuan untuk dapat mengatasi musibah tersebut. Mengharapkan diri mereka sendiri dapat mengangkat dirinya tanpa pertolongan, sukar dipastikan.
- h. Laju pertumbuhan penduduk lebih memberatkan golongan miskin. Dengan jumlah keluarga besar, mereka sulit dapat menyekolahkan, memberi makan, dan pakaian secukupnya. Hanya keluarga yang kaya atau berpenghasilan besar sajalah yang mampu.



Dapatlah dipastikan bahwa golongan berpenghasilan rendah, karena kurang terjamah pendidikan, tidak memiliki sarana-sarana, misalnya kredit, modal, alat-alat produksi, relasi dan sebagainya, tidak akan mampu berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan menikmati pembagian hasil-hasilnya tanpa adanya kebijaksanaan khusus yang ditujukan untuk mengangkat mereka.

2.9 Penelitian Terdahulu

Keaslian Penelitian merupakan suatu syarat sebagai keabsahan suatu karya ilmiah yang dapat ditinjau dari ide dasar penelitian dan perbandingan penelitian dengan penelitian yang sejenis lainnya. Adapun keabsahan penelitian tentang “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kampar” dapat dilihat melalui beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :



Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
----	---------------	-------	-------------------	----------	-------------------	-------



1	Restu Harsiwi dan Jawoto Setyono	Sita dan Sih	Tingkat kerentanan ekonomi wilayah kabupaten wonigiri	Kabupaten Wonogiri	• pertumbuhan ekonomi • faktor kemiskinan	metode survei	1.Kabupaten Wonogiri tergolong dalam Kabupaten yang tergolong rentan tinggi apabila dilihat dari segi perekonomian. 2.Dari 4 faktor dominan yang mempengaruhi kerentanan ekonomi wilayah Kabupaten Wonogiri,Faktor Kemampuan Produksi Barang Dan Jasa memberikan kontribusi paling besar dalam mempengaruhi Tingkat Kerentanan Ekonomi
---	----------------------------------	--------------	---	--------------------	--	---------------	--



2	Mita Natalia dan Muhammad Mukti Alie	Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok)	Kampung Nelayan Tambak Lorok	• kualitas sumber daya manusia • kondisi infrastruktur • kepemilikan modal dan teknologi	Metode Kualitatif	Kemiskinan yang terjadi di kampung nelayan tambak lorok disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya kepemilikan modal usaha dan teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dengan rendahnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat yaitu Sekolah Dasar (SD) dan ketumuhan
---	--------------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------	---



3	Amelia Renggapratiwi	Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik Dan Respon Kebijakan	Kota Semarang	Karakteristik kemiskinan	Metode Kualitatif	Respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah.
---	----------------------	---	---------------	--	-------------------	---

N o	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
4	Rini Salman	Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Perkotaan	Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	- Sosial - Ekonomi - Pendapatan - Lapangan Pekerjaan - Tanggungan Keluarga - Pendidikan	Deskriptif Kuantitatif	Teridentifikasi karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin di kecamatan rumbai pesisir. Teridentifikasi



				Usaha Sampingan		faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di kecamatan rumbai pesisir Teridentifikasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan
5	Arick Bagus Prasetya (2019)	Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tambang	Kecamatan Tambang	- Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang - Untuk Mengetahui	Metode Kuantitatif	Dari segi pendidikan angka partisipasi sekolah terkini cukup tinggi, namun masih ada beberapa anak yang putus



Kabupaten
Kampar)

Faktor-faktor
yang
mempengaruh
i tingkat
kemiskinan di
Kecamatan
Tambang

- Untuk
merumuskan
strategi
penanggulang
an kemiskinan
di Kecamatan
Tambang

sekolah
dikarenakan
tidak mampu
memenuhi biaya
pendidikan. Yang
menjadi masalah
di dalam
pendidikan
rendahnya
tingkat
pendidikan
kepala rumah
tangga, terutama
masyarakat
miskin. Dan
untuk standar
hidup berupa
sanitasi, air
minum, jaringan
listrik dan kondisi
rumah di
Kecamatan
Tambang masih



				mengalami berbagai masalah yang cukup signifikan.
--	--	--	--	---



3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses penelitian yang bersifat deduktif dengan metode penelitian kuantitatif atau metode deskriptif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dengan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme (Sugiyono, 2012). Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Untuk mengumpulkan data digunakan instrument penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa kuisioner, observasi



lapangan dan dokumentasi gambar. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah angket dan instrument yang telah tersandar.

Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data terkait. Observasi lapangan untuk mendapatkan informasi langsung terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan. Dokumentasi gambar dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

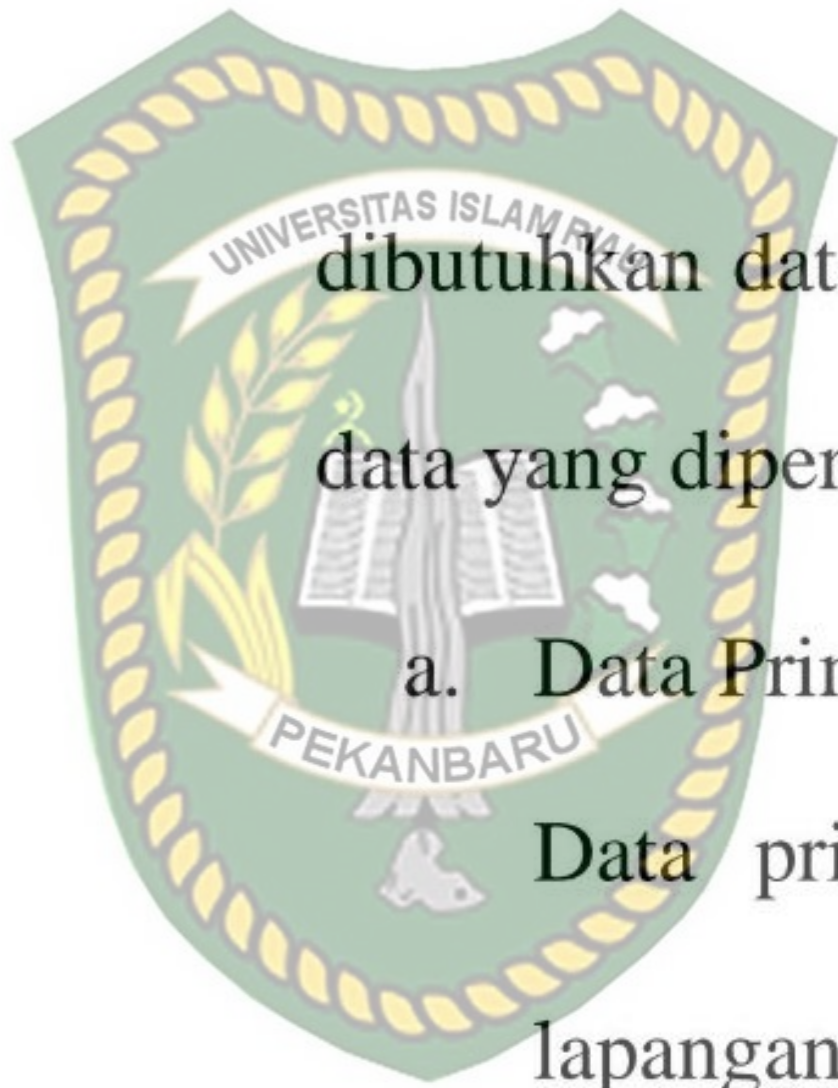
3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 hingga bulan Oktober 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini



dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan lengkap. Adapun jenis data yang diperlukan terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari hasil observasi lapangan (Sangadji, 2010), seperti yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan observasi langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif obyek studi. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Pengumpulan data primer dapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misal diambil dari surat kabar dan majalah ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau

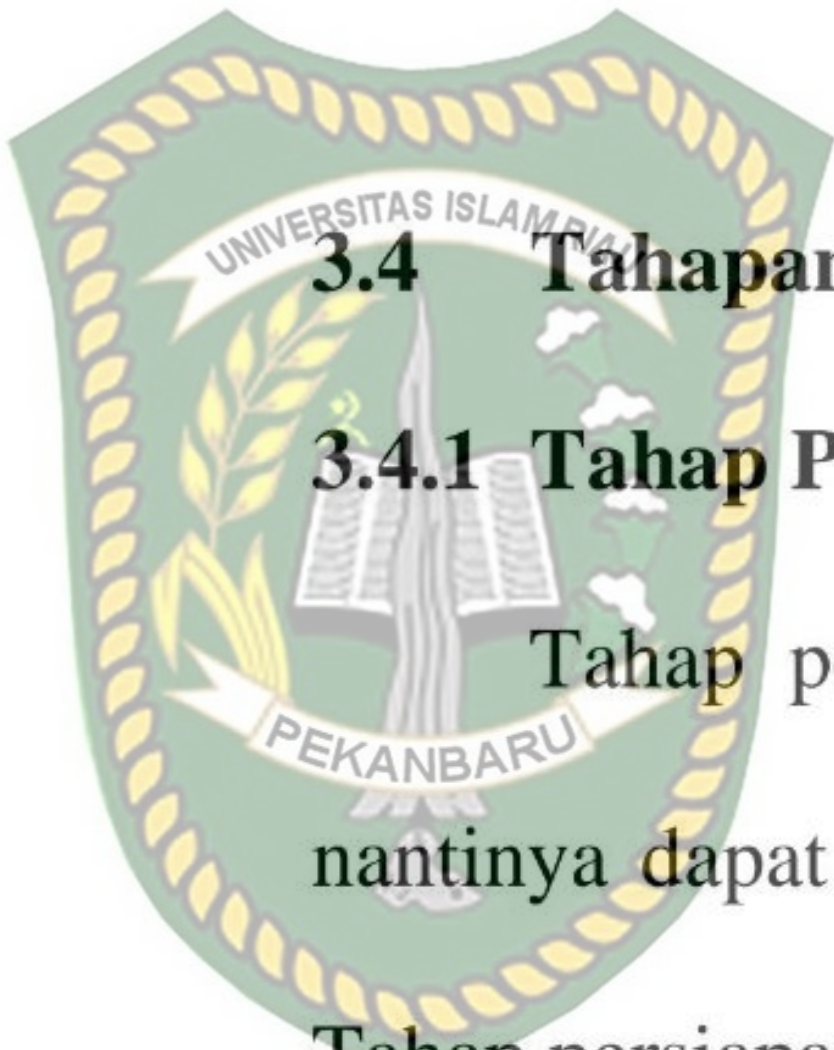


laporan yang telah disusun dalam arsip yang didokumentasikan maupun tidak didokumentasikan.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait sebagai berikut, yaitu:

- a. Kondisi penduduk miskin, kondisi sarana prasarana ekonomi, yang bersumber dari wawancara tokoh-tokoh masyarakat dan sebaran kuisioner.
- b. Data kemiskinan, seperti jumlah KK, tingkat perceraian, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang bersumber dari pengamatan observasi.
- c. Data BDT, data kependudukan Kecamatan Tambang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Kampar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar.



3.4 Tahapan Penelitian

3.4.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan diperlukan dalam kegiatan penelitian sehingga nantinya dapat diperoleh hasil serta data-data yang lengkap dan akurat.

Tahap persiapan ini meliputi:

a. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Sasaran Studi

Penentuan masalah untuk penelitian ini didasarkan pada kondisi yang ada pada saat ini, dan permasalahan perkembangan tersebut perlu dikaji guna memperoleh keadaan perkembangan pada saat ini, sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan perencanaan serta perumusan tujuan diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui perkembangan permasalahan yang di tentukan sebelumnya.

b. Penentuan Lokasi Studi

Lokasi studi yang diangkat dalam studi ini adalah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, karena Kecamatan Kampar merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Kampar.

c. Penentuan Kebutuhan Data



Untuk mempermudah pelaksanaan survei serta analisis yang akan dilakukan, diperlukan inventarisasi kebutuhan data maupun informasi yang mendukung penelitian.

d. Pengumpulan Studi Pustaka

Penelitian ini untuk mempermudah dalam pembuatan metodologi serta pemahan terhadap permasalahan yang diambil.

e. Perumusan Rencana Pelaksanaan Survei

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah diperoleh hasil survey awal yang sifatnya sementara, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapi data maupun informasi yang masih kurang, baik melalui observasi lapangan, wawancara kepada beberapa responden yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang diambil.

3.4.2 Tahap Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat sebagai berikut:



a. Kuesioner

Suroyoanwar (2009) Angket atau kuisisioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden.

Menurut Gantina komalasari,dkk (2011) kuesioner sebagai suatu alat pengumpul data dalam assessment non tes, berupa serangkaian yang diajukan kepada responden (peserta didik,orang tua atau masyarakat).

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2004). Menurut Hanna Djumhana, pengertian observasi adalah suatu metode ilmiah yang paling utama dalam ilmu pengetahuan empiris serta masih mendapat pengakuan dari dunia penelitian karya ilmiah sebagai metode yang sering digunakan dalam melakukan pengumpulan data.

c. Studi Pustaka



Studi pustaka adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sekaran, 2006).

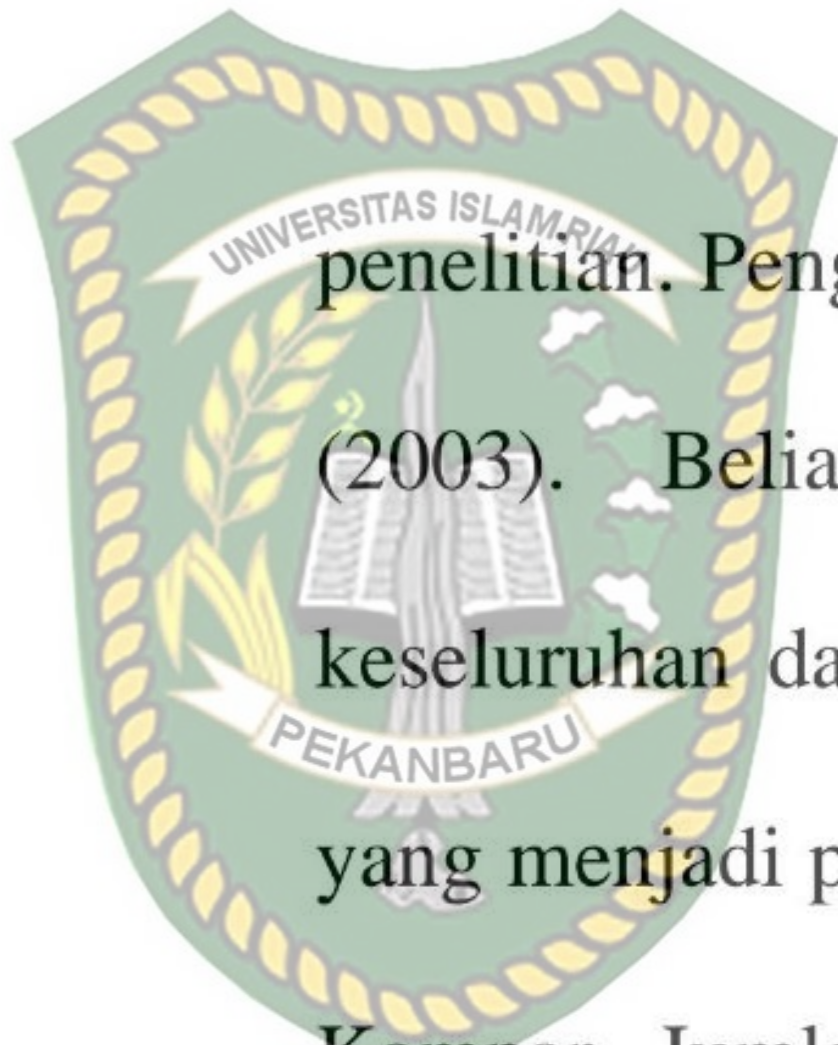
- d. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dengan *Stakeholder* untuk memperoleh data yang bersifat fisik dan non fisik yang dialami masyarakat.

3.5 Populasi dan Teknik Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Arikunto (2002), pengertian populasi adalah objek yang secara keseluruhan digunakan untuk penelitian. Jadi apabila ada seseorang yang hendak meneliti semua karakteristik dan elemen dalam suatu wilayah penelitian, tentu saja penelitian tersebut termasuk dalam penelitian populasi.

Sedangkan Ismiyanto berpendapat bahwa populasi adalah totalitas atau keseluruhan subjek penelitian baik benda, orang, ataupun suatu hal lain yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data



penelitian. Pengertian populasi dan sampel juga dijelaskan oleh Nursalam (2003). Beliau menjelaskan bahwa populasi merupakan suatu keseluruhan dari variabel penting yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Kampar. Jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Kampar berjumlah 15.452 jiwa.

3.5.2 Teknik Sampel

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama mengenai tingkat kemiskinan, akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk disampaikan kepada responden yaitu masyarakat miskin yang bertempat tinggal di Kecamatan Kampar. Rumus sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah rumus Slovin.

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\
 n &= \frac{15.452}{1 + 15.452 (0.10)^2} \\
 n &= \frac{15.452}{1 + 15.452 (0,10)} \\
 n &= \frac{15.452}{1 + 154,52} \\
 n &= \frac{15.452}{155,52} \\
 n &= 100
 \end{aligned}$$

Dimana:



n : Jumlah sampel minimal e : Error margin 10%

N : Populasi

Dengan tingkat presisi atau tingkat kesalahan sebesar 10%, didapat jumlah sampel masyarakat miskin di Kecamatan Kampar sebanyak 100, dengan asumsi jumlah masyarakat miskin di setiap desa sama.

Tabel 3.1 Distribusi Sampel Per-Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (ribu) ¹	Sampel
1	Batu Belah	5510	10
2	Tanjung Berulak	2487	8
3	Air Tiris	6252	11
4	Ranah	3218	9
5	Penyasawan	5504	12
6	Rumbio	3214	8
7	Padang Mutung	3578	7
8	Simpang Kubu	2588	6
9	Tanjung Rambutan	2496	6
10	Pulau Jambu	1662	3
11	Limau Manis	2045	5
12	Naumbai Ranah	1912	4
13	Ranah Singkuang	1387	4
14	Pulau Tinggi	1725	3
15	Koto Tibun	2677	4
16	Bukit Ranah	2296	3
17	Ranah Baru	1306	4
18	Pulau Sarak	1339	5
Jumlah		51206	100

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu dengan cara *simple random sampling*, sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dimana maksud *probability sampling* adalah sesuatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.

Sampling ini digunakan dimana populasi dianggap homogen berdasarkan kriteria tertentu. Pengambilan unit sampel dari *sampling frame* dapat dilakukan dengan undian maupun dengan pertolongan bilangan random. Kelebihan teknik sampling ini adalah pelaksanaannya mudah, namun kelemahannya yaitu letak populasi jauh dan menyebar.

3.5 Teknik Analisis

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan *verifikasi* data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga bisa dikatakan sebagai sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan.



Metode analisis data adalah hal yang terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya analisis data, maka kesahihan sebuah penelitian masih diragukan. Karena dengan analisis data penelitian itu akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat.

Metode analisis data sangat mempengaruhi hasil penelitian, jika metode yang digunakan sesuai dengan objek penelitian, maka hasilnya akan dapat diterima, sedangkan jika tidak sesuai, maka penelitian itu pun dianggap gagal, karena itu, ketika melakukan sebuah penelitian, harus mempertimbangkan objek penelitian dan menentukan metode yang akan digunakan dalam analisis data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di urutkan berdasarkan dengan tujuan dan sasaran penelitian, adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian, yakni:

3.5.1 Karakteristik Kemiskinan

Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar proses analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.



Dimana berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Bappenas maka beberapa jenis karakteristik kemiskinan seperti kesehatan, (penolong persalinan, vaksinasi, jaminan kesehatan), pendidikan (partisipasi sekolah, tahun sekolah, buta huruf), dan standar hidup (sanitasi, air minum, listrik, bahan bakar memasak, kondisi rumah, kepemilikan rumah, kepemilikan telepon) menjadi acuan dalam memberikan gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan, dengan itu dilakukan proses analisis dengan mengidentifikasi karakteristik kemiskinan dilokasi penelitian.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur
1. Tingkat Pendidikan	Jenjang sekolah yang pernah diraih dan mendapatkan ijazah.	Kuesioner	1. Rendah (SD dan SMP) 2. Tinggi (SMA ke atas)
2. Status Pekerjaan	Status pekerjaan kepala rumah tangga, apakah bekerja atau tidak bekerja.	Kuesioner	1. Tidak bekerja 2. Bekerja



3. Pendapatan Penduduk	Tingkat penghasilan keluarga diukur dari pengeluaran rata-rata perbulan dalam satuan rupiah	Kuesioner	1. Rendah bila pendapatan 1 bulan < Rp.1.500.000,- 2. Tinggi bila pendapatan 1 bulan > Rp.1.500.000,-
4. Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah anggota keluarga yang tinggal menetap dalam satu rumah, dimana biaya hidupnya menjadi tanggungan kepala rumah tangga, dalam satuan orang	Kuesioner	1. Tanggungan keluarga dikategorikan tinggi apabila > 3 orang 2. Tanggungan keluarga dikategorikan rendah apabila 1-3 orang
5. Keterbatasan Modal	Keterbatasan modal merupakan terbatasnya modal yang berguna untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan memperoleh penghasilan	Kuesioner	1. Tidak memiliki modal 2. Memiliki modal

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.6 Variabel Penelitian

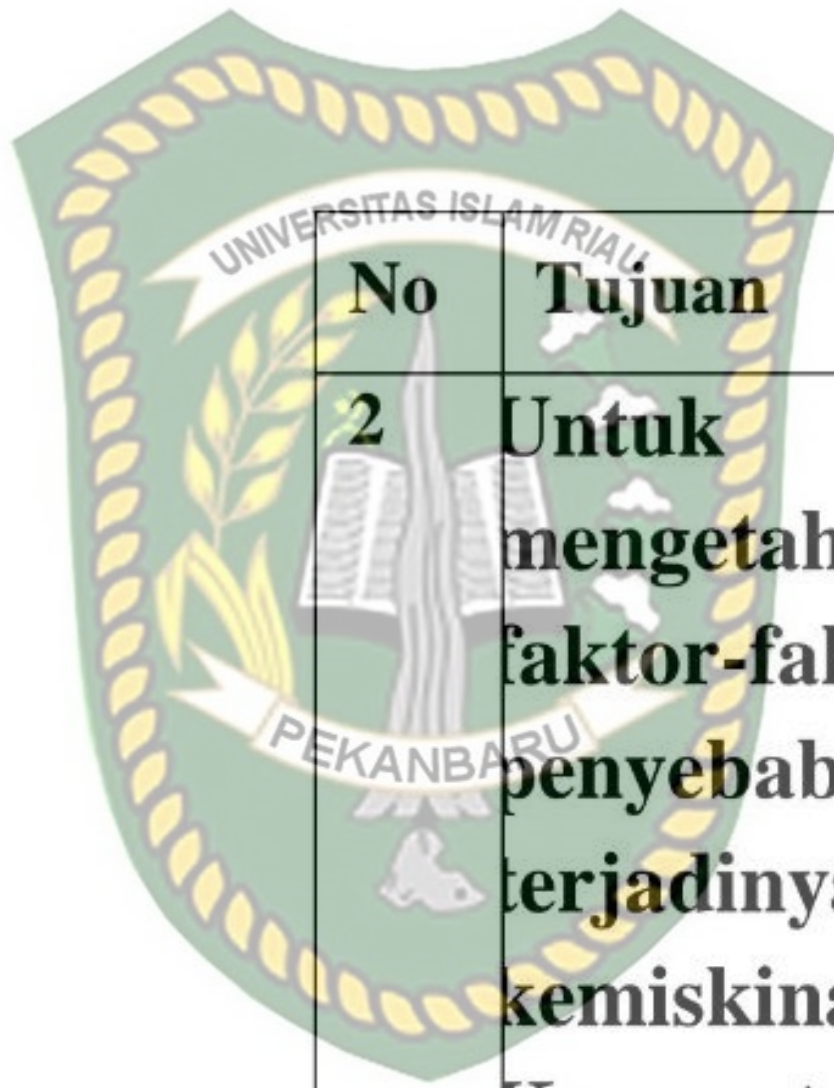
Menurut Sugiyono (2014) dalam Purnama (2015) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau



kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Setelah mengkaji teori dan konsep dari berbagai literature yang ada maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kampar. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Variabel Penelitian

No	Tujuan	Variabel	Indikator
1	Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar	Kesehatan	• Jaminan kesehatan
		Pendidikan	• Partisipasi sekolah • Buta huruf
		Standar hidup	• Sanitasi • Air minum • Listrik • Kondisi rumah (lantai, dinding, atap rumah)



No	Tujuan	Variabel	Indikator
2	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Kampar	Sosial ekonomi	• Tingkat pendidikan • Status pekerjaan • Pendapatan penduduk • Jumlah tanggungan keluarga • Keterbatasan modal

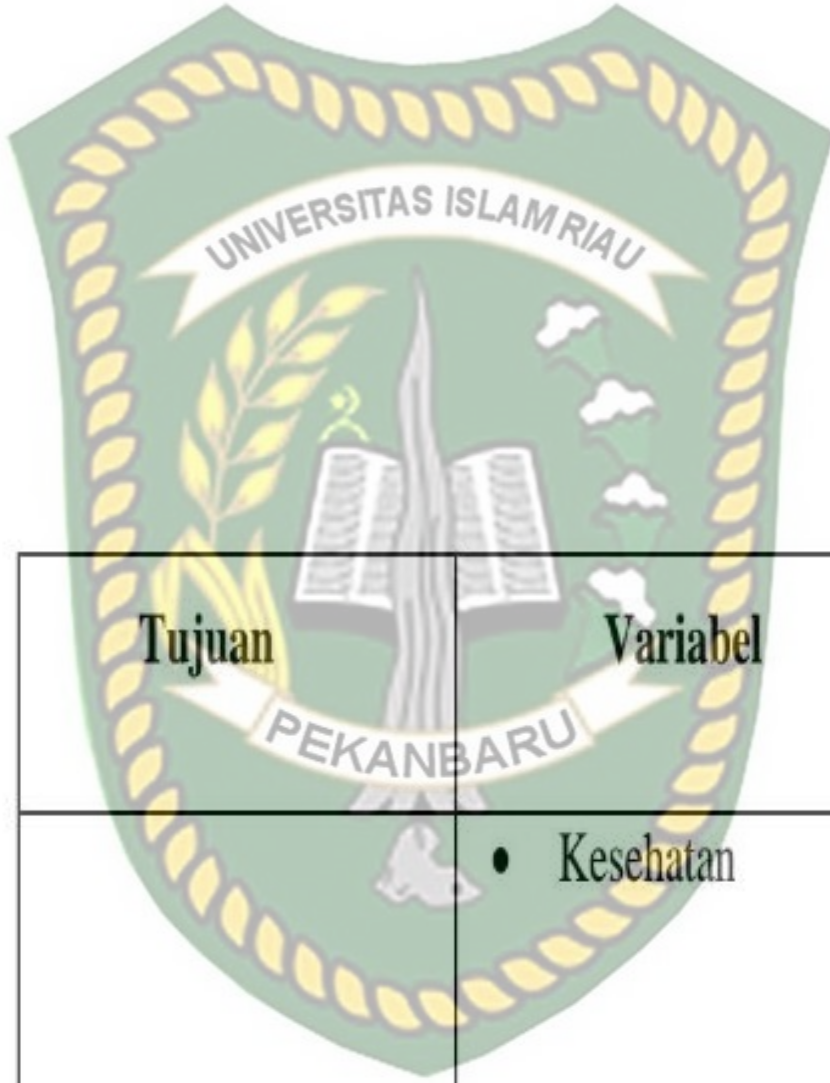
Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.7 Desain Penelitian

Desain penelitian ini berisi tentang gambaran variabel-variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian atau semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2003). Desain Penelitian berisikan yaitu berupa data, sumber, hingga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Tabel 3.4 Desain Penelitian

Tujuan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode pengambilan data	Metode Analisis	Teknik Analisis	Output
Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar	• Kesehatan	• Penolong persalinan • Vaksinasi • Jaminan kesehatan	• Bappeda • BPS • Pengamatan lapangan	• Observasi • Kunjungan dinas	Deskriptif kualitatif	Deskriptif	Gambaran umum karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar
	• Pendidikan	• Partisipasi sekolah • Tahun sekolah • Buta huruf					
	• Standar hidup	• Sanitasi • Air minum • Listrik • Bahan bakar memasak • Kondisi rumah • Kepemilikan rumah					
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Kampar	Sosial ekonomi	• Tingkat pendidikan • Status pekerjaan • Pendapatan penduduk • Jumlah tanggungan keluarga • Keterbatasan modal	Responden	• Kuesioner • Observasi • Wawancara	Deskriptif kualitatif	Deskriptif	Teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kecamatan Kampar

Sumber: Hasil Analisis, 2021



BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kampar

4.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Kampar adalah merupakan satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan ketinggian 30/50 Meter dari permukaan laut, suhu maksimum dan minimum 32/26°C dengan luas Kecamatan 146,66 Km² dengan pusat wilayah yaitu Kelurahan Air Tiris. Kecamatan Kampar ini terdiri dari 18 desa dan kelurahan yaitu desa Batu Belah, Desa Tanjung Berulak, Kelurahan Air Tiris, Desa Ranah, Desa Penyasawan, Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Simpang Kubu, Desa Tanjung Rambutan, Desa Pulau Jambu, Desa Limau Manis, Desa Naumbai, Desa Ranah Singkuang, Desa Pulau Tinggi, Desa Koto Tibun, Desa Bukit Ranah, Desa Ranah Baru, Desa Pulau Sarak

Batas-batas daerah Kecamatan Kampar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Bangkinang Kota.



4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Batu Belah	35,99	25,05
2	Tanjung Berulak	22,59	15,72
3	Air Tiris	5,56	3,87
4	Ranah	1,89	1,32
5	Penyasawan	19,51	13,58
6	Rumbio	16,38	11,40
7	Padang Mutung	5,07	3,53
8	Simpang Kubu	7,75	5,39
9	Tanjung Rambutan	6,65	4,63
10	Pulau Jambu	0,92	0,64
11	Limau Manis	2,09	1,45
12	Naumbai	2,09	1,45
13	Ranah Singkuang	3,44	2,39
14	Pulau Tinggi	3,00	2,09
15	Koto Tibun	5,07	3,53
16	Bukit Ranah	0,69	0,48
17	Ranah Baru	0,45	0,32
18	Pulau Sarak	4,53	3,15
Kecamatan Kampar		143,66	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2020



Dari tabel dan gambar diatas bisa disimpulkan bahwa desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Batu Belah dan wilayah yang terkecil adalah Desa Ranah Baru.

4.1.2 Kondisi Alam

Kecamatan Kampar secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara rata-rata 210 C – 350 C. Temperatur minimum terjadi pada bulan november dan desember yaitu sebesar 210 C. Temperatur maksimum terjadi pada juli dengan temperatur 350C. Jumlah hari hujan setahun rata-rata 256 hari (230,17 mm/tahun). Kondisi klimatologis demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam lima tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

4.1.3 Kependudukan

Penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.



Penduduk terus menerus akan terus berkembang. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi yang terjadi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu atau dalam sebuah populasi menggunakan satuan “per waktu unit” untuk pengukuran.

Mengetahui jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan pemerintahan khususnya Kecamatan Kampar. Pemerintahan Kecamatan Kampar terus memperbaharui data jumlah penduduk agar bisa dikorelasikan dengan berbagai aspek kehidupan lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Kampar bisa dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kampar Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Penduduk(ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Batu Belah	5 510	1,86
2	Tanjung Berulak	2 487	3,3
3	Air Tiris	6 252	0,2
4	Ranah	3 218	0,97
5	Penyasawan	5 504	1,71
6	Rumbio	3 214	0,09
7	Padang Mutung	3 578	6,2
8	Simpang Kubu	2 588	1,06
9	Tanjung Rambutan	2 496	1,96
10	Pulau Jambu	1 662	0,33
11	Limau Manis	2 054	1,87
12	Naumbai	1 912	0,77
13	Ranah Singkuang	1 387	2,03
14	Pulau Tinggi	1 735	0,69
15	Koto Tibun	2 677	1,18
16	Bukit Ranah	2 296	1,64



17	Ranah Baru	1 306	1,14
18	Pulau Sarak	1 339	1,97
Kecamatan Kampar		51 206	1,36

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2020

Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar pada tahun 2020 berjumlah 51,206 jiwa, yang terdiri dari 25,968 jiwa laki-laki dan 25,238 jiwa perempuan.

4.1.4 Pendidikan

Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dari orang yang bersangkutan

Menurut Todaro (2000) alasan pokok mengenai pengaruh dari pendidikan terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif



antara pendidikan seseorang dengan penghasilan yang akan diperolehnya. Adalah benar bahwa seseorang yang dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya atau perguruan tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang hanya mampu menyelesaikan sekolah yang lebih rendah tingkatannya, penghasilan mereka akan berbeda antara 300 hingga 800 persen. Oleh karena itu, tingkat pendapatan akan tergantung pada tahun-tahun sekolah yang dapat diselesaikannya, maka hal itu mendorong pemerintahan Kecamatan Kampar untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan bisa membuat suatu perbedaan pendapatan yang sangat tidak adil dan menimbulkan jurang kemiskinan.

Di Kecamatan Kampar terdapat berbagai jenjang pendidikan yang dimulai dari SD, SMP/MI, SMA/MA dan sebagainya. Dengan adanya sarana pendidikan seperti ini diharapkan angka buta huruf dan anak tidak sekolah bisa diminimalisir sebaik mungkin. Tabel 4.3 berikut ini akan memuat info sarana pendidikan di Kecamatan Kampar lebih detail lagi.



Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kampar Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SD	25	8	33
2	MI	-	12	12
3	SMP	5	-	5
4	MTS	2	10	12
5	SMA	2	-	2
6	MA	1	4	5
7	SMK	1	1	2
8	AKADEMI/PERGURUAN	-	1	1

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2020

Sedikitnya lembaga pendidikan negeri akan memberi kesulitan lain terhadap masyarakat Kecamatan Kampar. Tingginya biaya pendidikan di lembaga pendidikan swasta menjadi pertimbangan tersendiri oleh banyaknya wali murid. Pendidikan negeri di Kecamatan Kampar sebenarnya sangat membantu masyarakat miskin dengan adanya program wajib belajar 12 tahun yang dengan ini otomatis pendidikan di sekolah negeri sangat murah dibandingkan dengan sekolah swasta yang ada.

4.1.5 Kesehatan

Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan hal ini akan



memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti di puskesmas, rumah sakit, posyandu dan lain sebagainya.

Berikut ini Tabel 4.4 jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Kampar:

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kampar Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Rumah	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Apotek
1	Batu Belah	1	-	-	-	-
2	Tanjung Berulak	-	1	1	-	-
3	Air Tiris	-	1	-	1	4
4	Ranah	-	-	-	-	-
5	Penyasawan	-	-	-	-	-
6	Rumbio	-	-	-	-	-
7	Padang Mutung	-	-	1	-	-
8	Simpang Kubu	-	-	-	-	-
9	Tanjung Rambutan	-	-	-	-	-
10	Pulau Jambu	-	-	-	-	-
11	Limau Manis	-	-	-	-	-
12	Naumbai	-	-	-	-	-
13	Ranah Singkuang	-	-	-	-	-
14	Pulau Tinggi	-	-	-	-	-
15	Koto Tibun	-	-	-	-	-
16	Bukit Ranah	-	-	1	-	-
17	Ranah Baru	-	-	-	-	-
18	Pulau Sarak	-	-	1	-	1
Jumlah		1	2	4	1	5



Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2020

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tubuh manusia yang sehat akan mendukung kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana kesehatan diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Masyarakat juga bisa mengandalkan poliklinik untuk pengobatan lainnya.

4.1.6 Ekonomi

Sarana perekonomian di Kecamatan Kampar terdiri dari pertokoan, supermarket, minimarket, warung kelontong beberapa jumlah sarana ekonomi dan UMKM yang ada diharapkan dapat menggairahkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat serta sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Usaha Perdagangan yang Terdaftar Menurut Desa di Kecamatan Kampar Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Pasar Bangunan Permanen	Pasar Bangunan Semi-Permanen	Pasar Tanpa Bangunan
1	Batu Belah	-	-	-



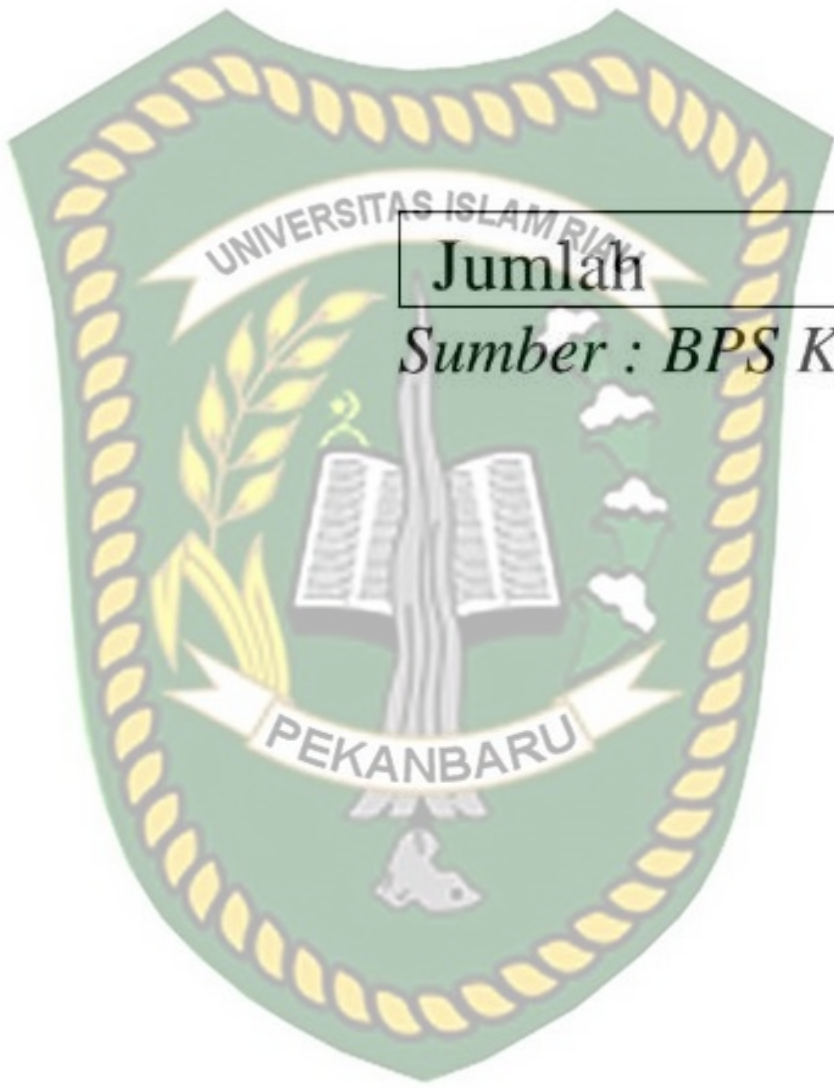
2	Tanjung Berulak	-	-	-
3	Air Tiris	14	1	1
4	Ranah	-	-	-
5	Penyasawan	-	-	-
6	Rumbio	2	-	1
7	Padang Mutung	-	1	-
8	Simpang Kubu	-	-	-
9	Tanjung Rambutan	-	-	-
10	Pulau Jambu	-	-	-
11	Limau Manis	-	-	-
12	Naumbai	-	-	-
13	Ranah Singkuang	-	-	-
14	Pulau Tinggi	-	-	-
15	Koto Tibun	-	-	-
16	Bukit Ranah	1	-	-
17	Ranah Baru	1	-	-
18	Pulau Sarak	-	-	-
Jumlah		18	2	2

No	Desa/Kelurahan	Minimarket/Swalayan	Toko/Warung Kelontong	Restoran/Rumah Makan
1	Batu Belah	-	11	-
2	Tanjung Berulak	-	-	-
3	Air Tiris	6	3	11
4	Ranah	-	10	-
5	Penyasawan	2	10	1
6	Rumbio	1	31	3
7	Padang Mutung	-	14	-
8	Simpang Kubu	1	3	1
9	Tanjung Rambutan	-	17	-



10	Pulau Jambu	-	12	-
11	Limau Manis	1	1	-
12	Naumbai	-	8	-
13	Ranah Singkuang	-	13	-
14	Pulau Tinggi	1	5	-
15	Koto Tibun	-	12	-
16	Bukit Ranah	1	15	1
17	Ranah Baru	-	10	-
18	Pulau Sarak	-	4	-
Jumlah		13	179	17

No	Desa/Kelurahan	Warung/Kedai Makanan	Hotel	Motel/Wisma
1	Batu Belah	30	-	-
2	Tanjung Berulak	6	-	-
3	Air Tiris	100	-	-
4	Ranah	30	-	-
5	Penyasawan	27	-	-
6	Rumbio	13	-	-
7	Padang Mutung	4	-	-
8	Simpang Kubu	15	-	-
9	Tanjung Rambutan	10	-	-
10	Pulau Jambu	5	-	-
11	Limau Manis	15	-	-
12	Naumbai	12	-	-
13	Ranah Singkuang	2	-	-
14	Pulau Tinggi	-	-	-
15	Koto Tibun	36	-	-
16	Bukit Ranah	32	-	-
17	Ranah Baru	10	-	-
18	Pulau Sarak	15	-	-



Jumlah	362		
--------	-----	--	--

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2020



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Kemiskinan di Kecamatan Kampar

Pembahasan ini membahas mengenai kondisi karakteristik kemiskinan dilihat dari segi kesehatan, pendidikan dan standar hidup, maka dapat diketahui bagaimana kondisi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.

5.1.1 Kesehatan

Segi kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk dijaga untuk semua golongan umur, dengan menjaga kesehatan tentu sangat berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup. Dengan menjaga kesehatan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, seperti bekerja, bersekolah maupun beribadah. Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi perhatian kita bersama, baik dari individu masing-masing hingga pemerintah juga harus memperhatikan kualitas kesehatan masyarakatnya, banyak masyarakat yang kurang peduli dalam menjaga kesehatan, baik dari pola hidup yang kurang sehat dan mengonsumsi makanan



sembarangan. Dalam hal ini kesehatan merupakan salah satu indikator menentukan karakteristik kemiskinan di suatu daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Ada tiga penilaian kesehatan yaitu: penolong persalinan, vaksinasi dan jaminan kesehatan. Maka dengan tiga penilaian tersebut dapat diketahui berapa jumlah masyarakat di Kecamatan Kampar yang menggunakan penolong persalinan, jumlah masyarakat yang melakukan vaksinasi dan jaminan kesehatan apa yang digunakan masyarakat di Kecamatan Kampar.

5.1.1.1 Jaminan Kesehatan di Kecamatan Kampar

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama yakni pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Pada saat itu



pemerintah juga mendirikan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional.

Berdasarkan basis data terpadu kempas tahun 2018, masyarakat berpenghasilan rendah penerima program bantuan sebanyak 21.637 jiwa. Beberapa program bantuan salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digratiskan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Dengan digratiskannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah maka sangat membantu sehingga kendala biaya pengobatan sudah cukup bisa diatasi.

KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara



Jaminan Kesehatan (BPJS). Mereka ini bingung mana asuransi kesehatan yang benar-benar mewakili pemerintah atau negara? Lalu banyak yang juga menanyakan apa sebenarnya perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS ini?

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Maret 2014 lalu.

Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya



ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:

- a. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut.
- b. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.
- c. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja.
- d. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan



penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.

- e. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan.

5.1.2 Pendidikan

Menurut Afzal (2012), pendidikan memiliki pengaruh dan manfaat yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan, selain peningkatan dalam kualitas pendidikan dan akses yang mudah dalam memperoleh pendidikan. Sebagian masyarakat mereka berpandangan sempit bahwa pendidikan bukanlah segalanya. Hal ini, menyebabkan mereka mengalami krisis motivasi dan keinginan akan kebutuhan pendidikan yang berujung pada rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan di tingkat masyarakat.

Dalam hal ini diperlukan adanya usaha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam menyiapkan



generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan yang terkait dengan eksistensi serta keberlangsungan hidup dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkelanjutan baik bagi masyarakat di pedesaan pada khususnya maupun bangsa pada umumnya, hingga menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu komponen penyebab terjadinya kemiskinan. Pembangunan bidang pendidikan adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Bidang pendidikan mempunyai peran dalam upaya memberantas kebodohan dan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya, terlebih masyarakat di pedesaan yang tingkat kesejahteraan hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat disekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk



mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan saling membantu dalam melakukan pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dengan sasarannya yang jelas.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya angka partisipasi sekolah tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 5.1 Hasil Pengukuran Persepsi Masyarakat Variabel Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
1	Program Pendidikan	SS (5)	40	160	3,90	1,193
		S (4)	30	120		
		N (3)	16	48		
		TS (2)	8	16		
		STS (1)	6	6		



No	Pendidikan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		Total	100	350		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{350}{500} \times 100$ $= 70 \%$ $= Setuju$				
2	Bantuan Pendidikan	SS (5)	63	315	4,28	1,147
		S (4)	17	68		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	428		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{428}{500} \times 100$ $= 85,6 \%$ $= Sangat\ Cukup$				
3	Sarana Pendidikan	SS (5)	5	25	2,05	1,123
		S (4)	5	20		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	30	60		
		STS (1)	40	40		
		Total	100	205		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{205}{500} \times 100$ $= 41 \%$ $= Cukup$				
4	Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan	SS (5)	5	25	2,00	1,231
		S (4)	10	40		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	20	40		
		STS (1)	50	50		
		Total	100	200		



No	Pendidikan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		Indeks (%) $= \frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{200}{500} \times 100$ $= 40 \%$ $= \text{Cukup}$				
5	Partisipasi Masyarakat	SS (5)	45	225	3,95	1,209
		S (4)	25	100		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	395		
		Indeks (%) $= \frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{395}{500} \times 100$ $= 79 \%$ $= \text{Setuju}$				
6	Program Pendidikan Mengatasi Masalah Buta Huruf	SS (5)	60	300	4,25	1,140
		S (4)	20	80		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	425		
		Indeks (%) $= \frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{425}{85} \times 100$ $= 43 \%$ $= \text{Cukup}$				

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju



STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel 5.1 di atas didapatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pendidikan dalam pengaruhnya bagi kemiskinan sangatlah besar dilihat dari program pendidikan mendapatkan skor 70% dengan memuaskan, bantuan pendidikan pada skor 85,6 % dengan sangat cukup, sarana pendidikan dengan skor 41% dengan cukup, Sumber daya pendidikan (SDM) dengan 40% dengan cukup, Partisipasi masyarakat dengan skor 79% dengan setuju dan program pendidikan mengatasi buta huruf dengan skor 43% dengan cukup. Didapatkan hasil rata-rata skor pada responden dengan kategori setuju akan pendidikan dalam kemiskinan.

Indikator dalam menilai karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar terdapat indikator yang dikelurakan oleh Bappenas salah satunya standar hidup yang terdiri dari kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik, dan kondisi rumah yang terdapat di Kecamatan Kampar. Semakin baik kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik, dan kondisi rumah di Kecamatan Kampar akan berpengaruh terhadap standar hidup. Dengan



kondisi yang baik akan mencerminkan baiknya kualitas standar hidup pada kecamatan tersebut dan sebaliknya. Kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik, dan kondisi rumah akan sebanding lurus dengan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kampar. Semakin banyak masyarakat miskin maka akan semakin buruk kondisi tersebut, dan semakin sedikit masyarakat miskin maka kondisi tersebut cukup terjaga. Dengan kondisi tersebut dapat dilihat bagaimana karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.

Dalam menghitung standar kehidupan pada suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai pada suatu wilayah dan daerah tersebut, yakni seperti kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik dan kondisi rumah. Indikator-indikator di dalam standar kehidupan tersebut di gunakan dalam mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.

Air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu *grey water* (air bekas mandi dan cuci) serta *black water* (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Kampar terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang



dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan *septic tank* maupun *cubluk*. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok (KSM), baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal.

Dilihat kondisi pengelolaan Air limbah domestic secara keseluruhan di Kecamatan Kampar masih belum memadai. Sistem pengelolaan air limbah domestik belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Kecamatan Kampar pada saat ini pengelolaan *black water* (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih belum ada. Sementara itu sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara *on-site system (setempat)*. Sistem pengolahan air limbah secara *onsite sistem* pun masih belum memadai. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Sistem



pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor.

Diperlukannya peran serta masyarakat di Kecamatan Kampar dalam penanganan limbah cair masih terbatas pada kesadaran untuk hidup sehat dengan membangun jamban dan tangki septik sendiri tanpa bantuan pemerintah. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban rumah tangga maupun jamban umum masih rendah yang ditunjukkan dengan masih adanya sebagian masyarakat yang membuang limbah cair langsung dari toilet ke sungai maupun BAB. Beberapa sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah telah dimanfaatkan dan dioperasikan oleh masyarakat namun belum optimal dimanfaatkan dan dioperasikan oleh masyarakat namun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah.

Penduduk di Kecamatan Kampar mendapatkan air bersih yang salah satunya digunakan untuk sumber air minum secara individual yaitu dengan memanfaatkan sumber - sumber air yang ada di sekitarnya yaitu berupa, air tanah dangkal (sumur bor), air permukaan (sungai) dan air



tadah hujan, air permukaan dan sumur dangkal dimana kualitasnya tidak layak sebagai sumber air baku untuk air minum, rata-rata di setiap desa air sumur dangkal/sumur gali dan sumur air tanah dalam merupakan sumber air baku utama untuk penyediaan air minumnya disamping sebagai alternative masyarakat memanfaatkan pelayanan air bersih komersil swasta dengan membeli air kemasan isi ulang. Sedangkan SPAM Eksisting Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).

Sementara itu jaringan listrik merupakan salah satu prasarana yang sangat di butuhkan pada masa saat sekarang. Dimana banyaknya wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terdapatnya jaringan listrik atau penggunaan jaringan listrik yang hanya dibatasi waktunya. Kondisi jaringan listrik merupakan salah satu indikator dalam penentuan akan standar kehidupan suatu wilayah atau daerah.

Pemenuhan akan kebutuhan jaringan listrik yang sangat tinggi setiap tahunnya akan memberikan dampak dalam hal kondisi jaringan listrik pada suatu wilayah atau daerah. Kondisi berakibatkan banyak masyarakat tidak menggunakan jaringan listrik. Alasan utama masyarakat tidak menggunakan jaringan listrik yakni tidak adanya biaya



dalam hal pembayaran listrik tersebut. Kondisi ini mengakibatkan angka kemiskinan yang semakin bertambah akan tetapi tidak di imbangi dengan kondisi jaringan listrik yang memadai.

Mengatasi akan masalah tersebut maka telah dilakukannya berbagai upaya dari pemerintah dalam menagatsi akan masalah tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya pemerataan jaringan listrik di seluruh Indonesia. Selain akan program tersebut pemerintah juga menerapkan akan program percepatan elektrifikasi di pedesaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik. Dalam penyediaan jaringan listrik secara keseluruhan di Kecamatan Kampar sudah tersedia di hamper seluruh kawasan permukiman di Kecamatan Kampar. Kondisi jaringan listrik tersbut dalam keadaan baik, banyaknya masyarakat dalam kehidupan sehari menggunakan jaringan listrik dalam kehidupan sehari-harinya.

Tabel 5.2 Kondisi Jaringan Listrik di Kecamatan Kampar

No	Desa-Desa di Kecamatan Kampar	Penerangan
		Kondisi Umum
1	Batu Belah	Terdapat listrik PLN
2	Tanjung Berulak	Terdapat listrik PLN
3	Air Tiris	Terdapat listrik PLN



No	Desa-Desa di Kecamatan Kampar	Penerangan
		Kondisi Umum
4	Ranah	Terdapat listrik PLN
5	Penyasawan	Terdapat listrik PLN
6	Rumbio	Terdapat listrik PLN
7	Padang Mutung	Terdapat listrik PLN
8	Simpang Kubu	Terdapat listrik PLN
9	Tanjung Rambutan	Terdapat listrik PLN
10	Pulau Jambu	Terdapat listrik PLN
11	Limau Manis	Terdapat listrik PLN
12	Naumbai	Terdapat listrik PLN
13	Ranah Singkuang	Terdapat listrik PLN
14	Pulau Tinggi	Terdapat listrik PLN
15	Koto Tibun	Terdapat listrik PLN
16	Bukit Ranah	Terdapat listrik PLN
17	Ranah Baru	Terdapat listrik PLN
18	Pulau Sarak	Terdapat listrik PLN

Sumber : Hasil Survei, 2021

Kondisi rumah merupakan salah satu indikator yang di keluarkan oleh BAPPENAS untuk menilai karakteristik kemiskinan di suatu daerah. Kondisi rumah di suatu daerah akan menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Semakin banyak masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah disuatu daerah maka akan ada unit-unit rumah dengan kondisi tidak layak huni di daerah tersebut, maka akan ada suatu program khusus baik yang dilakukan pemerintah



maupun swadaya untuk membuat program bantuan rumah untuk rumah tidak layak huni. Kondisi rumah yang terdapat di Kecamatan Kampar terdiri atas kondisi rumah permanen, kondisi rumah semi permanen, dan kondisi rumah tidak permanen. Hal ini dapat dilihat kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kampar tersebut.

Mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar di lakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Kampar. Mengetahui akan karakteristik kemiskinan pada bidang standar kehidupan di Kecamatan Kampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skla likert*.

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penentuan akan karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar dilakukan pemberian skoring untuk menentukan indikator-indikator pada aspek kemiskinan yang memiliki pengaruh sangat besar dalam penentuan tingkat karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.

Adapun untuk mengetahui hasil dari persepsi masyarakat terhadap standar kehidupan di Kecamatan Kampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.3 Hasil Penilaian Persepsi Masyarakat Terhadap Standar Kehidupan

No	Standar Kehidupan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
1	Program PASIMAS	SS (5)	55	275	4,20	1,128
		S (4)	25	100		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	420		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{420}{500} \times 100$ $= 84 \%$ $= \text{Setuju}$				
2	Program SPAM	SS (5)	40	200	3,90	1,185
		S (4)	30	120		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	390		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{390}{500} \times 100$ $= 78 \%$ $= \text{Cukup}$				
3	Program Sanitasi	SS (5)	30	150	3,40	1,435
		S (4)	20	80		
		N (3)	30	90		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	10	20		
		Total	100	360		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$				



N o	Standar Kehidupan	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
				$= \frac{360}{500} \times 100$ $= 72 \%$ $= \text{Cukup}$		
4	Program Jaringan Listrik	SS (5)	35	175	3,54	1,314
		S (4)	10	40		
		N (3)	35	105		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	10	10		
		Total	100	350		
				$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{350}{500} \times 100$ $= 70 \%$ $= \text{Cukup}$		
5	Program Layak Huni	SS (5)	60	300	4,15	1,201
		S (4)	10	40		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	415		
				$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{415}{500} \times 100$ $= 83 \%$ $= \text{Cukup}$		

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

TS : Sangat Tidak Setuju



Dilihat pada tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa standar kehidupan dapat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar, berdasarkan program PASIMAS didapatkan skor 84% dengan setuju, program SPAM dengan skor 78% dengan setuju, program sanitasi dengan skor 70% dengan cukup, program jaringan listrik skor 70% dengan cukup, program layak huni dengan skor 83% dengan cukup. Dengan hasil di atas didapatkan skor rata-rata yaitu skor cukup terhadap program standar hidup yang mampu dalam peningkatan perekonomian Terhadap masyarakat di Kecamatan Kampar.

5.2 Faktor Terjadinya Kemiskinan

Faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan Kampar pada umumnya hampir sama dengan Kecamatan lainnya yang ada di Indonesia, yakni disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, taraf kebutuhan ekonomi, kesejahteraan, pendapatan, penangguran, tanggungan keluarga, keterbatasan modal usaha, status



pekerjaan, dan penghasil yang rendah, faktor tersebutlah yang mempengaruhi akan tingkat kemiskinan di Kecamatan Kampar.

Status pekerjaan dari responden yang telah di data hampir semuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Tetapi keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat, secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Kampar berkerja sebagai petani. Pendapatan perbulan rata – rata setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari menggambarkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kampar adalah masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah) dan memiliki jumlah tanggungan yang lebih banyak, jika dalam suatu rumah tangga memiliki jumlah tanggungan tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan keluarga yang tinggi akan



berdampak pada kehidupan ekonomi dan social masyarakat Kecamatan Kampar.

Mengingat umumnya pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Kampar memperoleh pendapatan yang rendah dan tidak menentu serta status rumah tangga yakni termasuk kedalam MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan berpengaruh kepada pendapatan perbulan apabila ini terjadi terus menerus maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Kampar, hal ini dikarenakan dalam setiap keluarga hanya satu orang yang bekerja.

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan rumah tangga tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kondisi sosial dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Banyak sedikitnya anggota keluarga, erat kaitannya dengan pengeluaran. Keadaan ini mendorong rumah tangga untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab semakin tinggi jumlah tanggungan dalam keluarga maka semakin tinggipula pengeluaran yang dikeluarkan.



Tingkat pendidikan erat hubungannya dengan pola pikir dan sikap atau perilaku masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cenderung usaha yang dikelola atau pekerjaan yang diperoleh lebih rasional atau lebih baik dengan memanfaatkan pendidikan yang dimilikinya diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal.

Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam menentukan sumber daya manusia dalam hal pola pikir. Pendidikan yang rendah tidak mampu untuk merubah pola pikir seseorang untuk berorientasi kedepan. Tingkat pendidikan di lokasi penelitian rata-rata masih sangat rendah yaitu mayoritas responden masih berpendidikan SD–SMP dan hanya sedikit yang tamat SMA ke atas, sehingga tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang masih rendah menyulitkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Rendahnya tingkat pendidikan maka masyarakat tidak mempunyai akses yang baik terhadap informasi, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam berfikir untuk beralih pekerjaan lain selain petani, pedagang untuk mengembangkan usaha memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan yang rendah ini akan



mempengaruhi keberlangsungan kehidupan akibat dari pekerjaan yang tidak dapat memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup masing-masing keluarga sehingga berpengaruh pada pendapatan rumah tangganya.

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal dan bank juga menjadi salah satu sebab banyak pengembang khusus masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) gulung tikar. Harga tanah yang semakin tak ekonomis bagi rumah MBR sehingga pengembang kesulitan karena harga rumah MBR sudah dipatok pemerintah menjadi kendala besar apalagi sosialisasi untuk masyarakat tentang koperasi dan lain sebagainya sangat minim.

Mengetahui faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan Kampar di lakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden kepada masyarakat di Kecamatan Kampar, dalam mengetahui akan karakteristik kemiskinan pada bidang standar kehidupan di Kecamatan Kampar menggunakan interpretasi skor yang di dapatkan dari metode *skla likert*.



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penentuan akan faktor kemiskinan di Kecamatan Kampar dilakukan pemberian skoring untuk menentukan indikator-indikator pada aspek kemiskinan yang memiliki pengaruh sangat besar dalam penentuan tingkat karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar.

Adapaun untuk mengetahui hasil dari faktor kemiskinan di Kecamatan Kampar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4 Hasil Pengukuran Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Kemiskinan

No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
1	Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kesejahteraan	SS (5)	65	325	4,30	1,150
		S (4)	15	60		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	430		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{430}{500} \times 100$ = 86 % = Sangat Setuju				
2	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Pentingnya	SS (5)	40	200	3,90	1,185
		S (4)	20	80		



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
	Pendidikan	N (3)	20	60		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	10	10		
		Total	100	370		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{370}{500} \times 100$ $= 74 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
3	Taraf Kebutuhan Ekonomi	SS (5)	30	150	3,40	1,435
		S (4)	30	120		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	10	10		
		Total	100	360		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{360}{500} \times 100$ $= 72 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
4	Pendidikan Wajib Tahun 12	SS (5)	75	375	4,52	,969
		S (4)	10	40		
		N (3)	10	30		



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	2	2		
		Total	100	467		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{467}{500} \times 100$ $= 93,4 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
5	Pentingnya Pendidikan	SS (5)	60	300	4,38	930
S (4)	25	100				
N (3)	10	30				
TS (2)	3	6				
STS (1)	2	2				
Total	100	438				
Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{438}{500} \times 100$ $= 87,6 \%$ $= \text{Setuju}$						
6	Upah mempengaruhi akan Kemiskinan	SS (5)	55	275	4,15	1,158
S (4)	20	80				
N (3)	15	45				
TS (2)	5	10				
STS	5	5				



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		(1)				
		Total	100	415		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{415}{500} \times 100$ $= 83 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
7	Pentingnya Pendapatan untuk Kebutuhan Sehari-hari	SS (5)	70	350	4,35	1,158
		S (4)	10	40		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	435		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{435}{500} \times 100$ $= 87 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
8	Tamatan SD Sulit Mendapatkan Pekerjaan	SS (5)	65	325	4,35	1,114
		S (4)	20	80		
		N (3)	5	15		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	435		



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		Indeks (%) $= \frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{435}{500} \times 100$ $= 87 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
9	Tamatan D-III / S-1 / S-2 / S-3 Mudah dalam Mendapatkan Pekerjaan	SS (5)	20	100	3,10	1,267
		S (4)	10	40		
		N (3)	45	135		
		TS (2)	10	20		
		STS (1)	15	15		
		Total	100	310		
		Indeks (%) $= \frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{310}{500} \times 100$ $= 62 \%$ $= \text{Cukup}$				
10	Pengangguran Berpengaruh Terhadap Kemiskinan	SS (5)	50	250	4,15	1,114
		S (4)	30	120		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	415		
		Indeks (%) $= \frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{415}{500} \times 100$				



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		= 83 % = Sangat Setuju				
11	Banyaknya Tanggungan Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan	SS (5)	55	275	4,15	1,158
		S (4)	20	120		
		N (3)	15	45		
		TS (2)	5	10		
		STS (1)	5	5		
		Total	100	455		
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{455}{500} \times 100$ $= 91 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$				
12	Pentingnya Bekerja Pengaruh Terhadap Penghasilan	SS (5)	70	350	4,70	0,461
		S (4)	30	120		
		N (3)	0	0		
		TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
		Total	100	470		
		$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{470}{500} \times 100$ $= 94\%$ $= \text{Cukup}$				



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
13	Penghasilan Rendah terhadap Tingkat Kebutuhan	SS (5)	60	300	4,50	0,674
		S (4)	30	120		
		N (3)	10	30		
		TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
		Total	100	450		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{450}{500} \times 100$ $= 90 \%$ $= \text{Cukup}$				
14	Kemalasan Mempengaruhi Tingkat Kebutuhan	SS (5)	55	275	4,35	0,796
		S (4)	25	100		
		N (3)	20	60		
		TS (2)	0	0		
		STS (1)	0	0		
		Total	100	435		
		Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{435}{500} \times 100$ $= 87 \%$ $= \text{Cukup}$				
15	Besarnya Upah Meningkatkan Kesejahteraan	SS (5)	60	300	4,50	0,674
		S	30	120		



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden		Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		(4)				
		N	10	30		
		(3)				
		TS	0	0		
		(2)				
		STS	0	0		
		(1)				
Total	100	450				
Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{450}{500} \times 100$ $= 90 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$						
16	Keterbatasan Modal Usaha Mempengaruhi Kemiskinan	SS	50	250	4,30	0,785
		(5)				
		S	30	120		
		(4)				
		N	20	60		
		(3)				
		TS	0	0		
(2)						
STS	0	0				
(1)						
Total	100	430				
Indeks (%) = $\frac{Total\ Skor}{Y} \times 100$ $= \frac{430}{500} \times 100$ $= 86 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$						
17	Berpenghasilan Tinggi Mampu Memenuhi Kebutuhan Hidup	SS	70	350	4,55	0,744
		(5)				
		S	15	60		
(4)						
N	15	45				



No	Sosial Ekonomi	Jumlah Responden	Frekuensi skor	Mean	Standar Deviasi
		(3)			
		TS	0	0	
		(2)			
		STS	0	0	
		(1)			
		Total	100	455	
		Indeks (%) $= \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$ $= \frac{455}{500} \times 100$ $= 91 \%$ $= \text{Sangat Setuju}$			

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil dari persepsi masyarakat terhadap faktor kemiskinan pada sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kampar terdapat 17 indikator antara lain; pendidikan tinggi meningkatkan kesejahteraan didapatkan skor 86% dengan sangat setuju, kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya pendidikan dengan skor 74% sangat setuju, taraf kebutuhan ekonomi dengan skor 72% sangat setuju, pendidikan wajib 12 tahun dengan skor 93.4% dengan sangat



setuju, upah mempengaruhi akan kemiskinan skor 83% dengan sangat setuju, pentingnya pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari dengan skor 87% sangat setuju, tamatan SD sulit mendapatkan pekerjaan skor 87% dengan sangat setuju, tamatan D III/S1/S2/S3 mudah mendapatkan pekerjaan dengan skor 62% cukup, pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan skor 83% dengan sangat setuju, banyaknya tanggungan mempengaruhi tingkat kemiskinan skor 91% dengan sangat setuju, pentingnya bekerja pengaruh dalam kemiskinan skor 94% dengan cukup, penghasilan rendah terhadap tingkat kebutuhan skor 90% dengan cukup, kemalasan mempengaruhi tingkat kebutuhan skor 87% dengan cukup, besarnya upah meningkatkan kesejahteraan dengan skor 90% dengan sangat setuju, keterbatasan modal usaha mempengaruhi kemiskinan dengan skor 86% dengan sangat setuju, berpenghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan skor 91% dengan sangat setuju. Dari hasil tersebut didapatkan hasil rata-rata dengan skor setuju terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kampar.



6.1 Kesimpulan

BAB VI

PENUTUP

Dalam studi penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kemiskinan di Kecamatan Kampar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Karakteristik Kemiskinan Kecamatan Kampar

Berdasarkan hasil analisis karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar didapatkan terdapat berbagai indikator yang mempengaruhi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Kampar antara lain aspek kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan.

2. Analisis Faktor Kemiskinan Kecamatan Kampar

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan dalam analisis faktor kemiskinan Kecamatan Kampar didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan, taraf kebutuhan ekonomi, kesejahteraan, pendapatan, penangguran, tanggungan keluarga, keterbatasan modal usaha, status pekerjaan, dan penghasilan yang rendah, Faktor



tersebutlah yang mempengaruhi akan tingkat kemiskinan di Kecamatan Kampar.

6.2 Saran

1. Kepada pemerintah baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota agar mendukung program-program dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Kepada pihak swasta agar mampu berkontribusi dalam membantu pihak pemerintah dalam upaya pembangunan yang telah ada dan ikut serta dalam mendukung setiap program yang akan di rencanakan guna untuk kepentingan dan kebaikan bersama.
3. Kepada masyarakat yang di sekitar Kecamatan Kampar agar mampu mendukung dalam setiap program yang akan di laksanakan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pihak masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi, menjaga dan ikut serta dalam semua program yang telah di lakukan, dimana tanpa adanya dukungan dari



masyarakat tentu suatu program tidak akan dapat berjalan dengan baik dan sempurna.

4. Dalam menyelesaikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Kampar, sebaiknya wilayah yang dikaji lebih kecil dan penambahan akan indikator-indikator dalam penentuan akan tingkat kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

Kasim, Muslim. (2006). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya (Studi Kasus di Kabupaten Padang Mariaman. Jakarta: Indomedia.

Komalasari, Gantina., Eka Wahyuni., dan Karsih. (2011). Teori dan Teknik Konseling. Jakarta: Indeks.

Ritonga, Hamonangan. (2003). Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta: Badan pusat Statistik.

Riduwan. (2004). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.

Suharto, (2003). Paradigma Baru studi Kemiskinan, <http://immugm.org.public.html>. arti cle. php

Suparlan, (ed). (2005). Kemiskinan di Perkotaan Untuk Antropologi. Yayasan Obor Indonesia Sinar Harapan. Jakarta.

Suryawati. (2004). Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.

Sugiyono, (2013), Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta



Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Sangadji, E. M. dan Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: C.V Andi.

Suroyo Anwar,. (2009). Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview,.
Kuesioner dan Sosiometri. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Purnama. (2015). “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat
Kemiskinan Di Sumatera Utara”. Jurnal Ekonomi. Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.